

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN



TAHUN **2022**



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Telepon: 0411 448365, e-mail : info@pt-makassar.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan tahun 2022, dapat diselesaikan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini meliputi bidang teknis yudisial, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi. Disamping memberikan informasi sebagai bentuk pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan menjadi lebih baik, untuk dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 telah diupayakan secara optimal dan objektif, namun apabila masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu adanya saran yang konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak, untuk kesempurnaan laporan dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada segenap Tim Penyusun dan semua warga Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mendukung penyusunan laporan ini dan melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan yang Agung.

Makassar, 16 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar



Dr. H. SYAHRIL SIDIK, SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
VISI dan MISI	6
BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PELAYANAN HUKUM.....	7
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	11
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	14
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	17
B. Penyelesaian Perkara.....	20
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	20
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	23
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK.....	23
4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi.....	26
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	27
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	28
POSBAKUM	28
SIDANG KELILING/Pelayanan Terpadu	30
PERKARA PRODEO.....	31
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	34
MUTASI	35
PROMOSI	42
PENSIUN	52
DIKLAT	60
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	64
A. Pengelolaan Keuangan.....	64
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	67
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	74
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	79
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	79
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	80
C. Inovasi Pelayanan Publik	80
D. E-Berpadu.....	99
BAB VI PENGAWASAN.....	105
A. Internal.....	105
B. Evaluasi	105
BAB VII PENUTUP	109
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi.....	116

DAFTAR TABEL

1	Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022	7
2	Tabel II.2. Keadaan Perkara Perdata Tingkat Banding Tahun 2022	11
3	Tabel II.3. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Banding Tahun 2022	14
4	Tabel II.4. Keadaan Perkara Tipikor Tingkat Banding Tahun 2022	17
5	Tabel II.5. Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Makassar Yang Diputus Tahun 2022	20
6	Tabel II.6. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 Pengadilan Tingkat Pertama yang Putus Tahun 2022	20
7	Tabel II.7. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar yang Diputus Tepat Waktu	23
8	Tabel II.8. Rekapitulasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022	23
9	Tabel II.9. Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi	26
10	Tabel II.10. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	27
11	Tabel II.11. Realisasi Anggaran POSBAKUM	29
12	Tabel II.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2022	31
13	Tabel II.13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2022	33
14	Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022	34
15	Tabel III.2. Rekap Mutasi Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022	35
16	Tabel III.3. Mutasi Keluar Tahun 2022	36
17	Tabel III.4. Promosi Jabatan Tahun 2022	42
18	Tabel III.5. Pensiun Tahun 2022	53
19	Tabel III.6. Tenaga Tehnis Yang Pernah Mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme Dan Pendidikan Formal Hukum (S1, S2 Dan S3)	55
20	Tabel III.7. Prosentase Tenaga Teknis yang telah mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme	56
21	Tabel IV.1. LRADIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	58
22	Tabel IV.2. LRADIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	59
23	Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	60
24	Tabel IV.4. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	61
25	Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022	66
26	Tabel IV.6. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	77
27	Tabel IV.7. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022	78
28	Tabel V.1. Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Yang Telah Terakreditasi	79
29	Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	82
30	Tabel V.3. 3 Data Pelaksanaan e-Berpadu Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	99
31	Tabel V.4. Kendala/Hambatan Pelaksanaan e-Berpadu pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar	100

BAB I PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1 dan 2 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada lingkungan Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi Makassar mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana, perkara perdata, perkara tipikor di tingkat banding serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi juga mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan tinggi dan salah satunya adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi yang sangat luas dengan wilayah yurisdiksi 23 (dua puluh tiga) satuan kerja Pengadilan Negeri yang tersebar di Kota dan Kabupaten se Sulawesi Selatan.



Pengadilan Tinggi Makassar mengharapkan terwujudnya transparansi peradilan dan pelayanan publik yang baik guna mendukung transparansi peradilan yang sangat ditunggu dan didambakan oleh masyarakat pencari keadilan di Makassar.



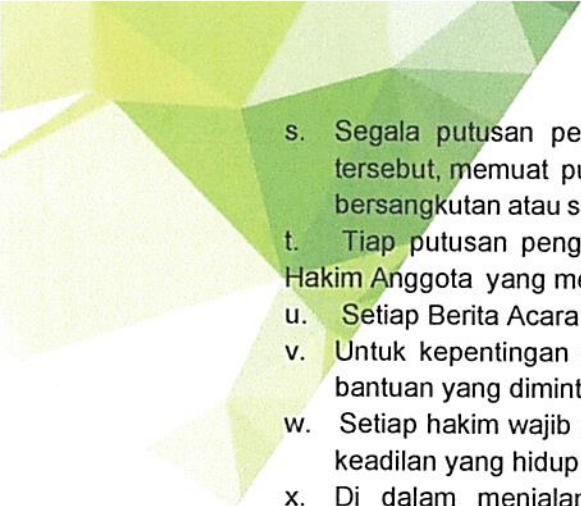
Sejalan dengan itu seluruh satuan kerja Peradilan Negeri se Sulawesi Selatan telah mengelola website sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi dan selain itu transparansi seluruh Pengadilan Negeri se Sulawesi Selatan diwajibkan untuk mengelola meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan, serta mewajibkan seluruh aparat Peradilan untuk meng-input data perkara kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Bahwa sejalan dengan transparansi Informasi melalui Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Tinggi Makassar tetap berupaya untuk melakukan upaya mendukung Pembaruan di Mahkamah Agung, sebagaimana yang digariskan didalam Cetak Biru Pembaruan Badan Peradilan 2010-2035 yang berisi langkah-langkah dan upaya pengadilan unggul meliputi 7 (tujuh) area yang harus dikembangkan yaitu:

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;
2. Kebijakan-kebijakan Pengadilan;
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Anggaran;
4. Penyelenggaraan Persidangan;
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Keadilan;
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Bahwa sebagai wujud konkrit Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, telah melakukan langkah-langkah kongkrit yaitu:

1. **Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman**, terus meningkatkan ketaatan pada asas dan peraturan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, dengan lebih memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan. Asas-asas penyelenggaraan peradilan adalah sebagai berikut:
 - a. Semua pengadilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 - b. Peradilan dilakukan **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA"**.
 - c. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - f. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - g. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.
 - h. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 - i. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - j. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
 - k. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - l. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
 - m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
 - n. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
 - o. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - p. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - q. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - r. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

- 
- s. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
 - t. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota yang memutus dan juga oleh Panitera yang membantu persidangan.
 - u. Setiap Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera sidang.
 - v. Untuk kepentingan peradilan semua aparatur Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.
 - w. Setiap hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - x. Di dalam menjalankan tugasnya, setiap hakim harus memperhatikan hak, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana di atur dalam peraturan-perundangan yang berlaku.
 - y. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
 - z. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. **Di dalam Menyusun Suatu Perencanaan**, harus lebih meningkatkan dan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
- a. Asas stabilitas (*principle of planning stability*), artinya perencanaan diadakan untuk masa mendatang yang penuh perubahan dan ketidakpastian, dan karena kondisi yang penuh perubahan maka perlu adanya stabilitas, baik program kegiatan, *schedule/jadwal* maupun anggarannya.
 - b. Asas rasional, yaitu berdasarkan pemikiran-pemikiran dan perhitungan secara rasional, logis, bukan sekedar ramalan dan bukan sekedar atas kebiasaan yang telah dilakukan selama ini.
 - c. Asas kontinyu, yaitu mempunyai wawasan ke masa depan yang diinginkan atau berkelanjutan. Artinya perencanaan harus terus menerus dibuat dan berkelanjutan. Tidak sekali saja dibuat untuk seumur hidup organisasi.
 - d. Asas alternatif (*principle of present choices*). Perlu menentukan pilihan sejak awal, yang disusun sekarang. Oleh karena itu: orang, biaya, metoda, dan lain-lain, ditentukan untuk ikut menentukan hasilnya nanti.
 - e. Asas perkiraan (*principle of positive action*). Untuk tidak gagal dalam mendapatkan hasil di masa datang, harus menyusun/membuat rencana sekarang yang tepat (*sound plan*) dan yang dapat direalisasikan secara positif.
 - f. Asas keseimbangan (*principle of common surate effert*). Perencanaan harus mengarah kepada usaha-usaha yang serasi/seimbang. Jadi, tidak mengedepankan masalah teknis yudisial saja, akan tetapi juga memikirkan pula masalah non teknis yudisial.
 - g. Asas fleksibel/lentur (*principle of resistance to change*). Mengikut sertakan untuk melakukan perubahan melalui perencanaan, artinya luwes, dimanapun dalam hal apapun, serta bila manapun perencanaan itu cocok dapat dilaksanakan. Jadi dapat diterapkan pada tempat, waktu dan keadaan bagaimanapun juga.
 - h. Asas Manfaat, artinya perencanaan itu betul-betul memberikan manfaat dalam pencapaian tujuan organisasi, menghilangkan ketidakpastian dan membentuk hari depan yang lebih baik.

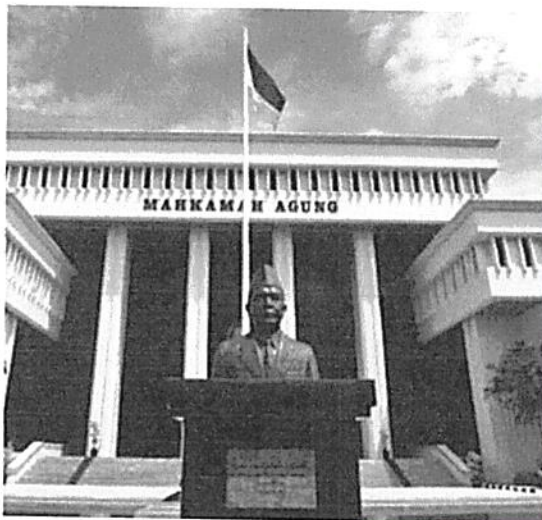
3. **Meningkatkan peran serta seluruh aparatur** / komponen Pengadilan, yaitu Hakim, Pejabat Struktural, pejabat fungsional kepaniteraan / kejurusitaan dan staf, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan;
4. **Menyederhanakan ketentuan** dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, melalui Standard Operasional Procedure (SOP) dengan baik;
6. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab aparatur Pengadilan/seluruh komponen Pengadilan.
7. Membuat penetapan kinerja bagi seluruh Pejabat Pengadilan dan pejabat-pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat .
8. Melaporkan harta kekayaan seluruh aparatur Pengadilan yang terkena peraturan untuk itu, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
9. Mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan.
10. Pengadilan Tinggi Makassar terus meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kinerja aparatur Peradilan dibawahnya, dengan cara sebagai berikut:
 - a. **Pembinaan**
Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dengan didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris. Selain Pembinaan dengan kunjungan langsung ke Pengadilan Negeri juga dilakukan pembinaan melalui *teleconference*.
 - b. **Pengawasan**
Bahwa jadwal kunjungan kerja disetiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan didampingi oleh Pejabat struktural dan Pejabat fungsional kepaniteraan yang ditunjuk, dengan melakukan pemeriksaan terhadap bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan.
11. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan, seiring dengan berjalannya waktu maka di akhir penghujung tahun 2015, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang **ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN** yang berlaku sejak tanggal di Undangkan pada tanggal 7 Oktober 2015.
12. Dalam pengelolaan keuangan negara, Pengadilan Tinggi Makassar, telah meningkatkan:
 - a. Kualitas dalam tata cara dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) yang aspiratif (memenuhi standar kebutuhan Pengadilan), partisipatif (melibatkan seluruh komponen pengadilan), didasarkan argumentasi, parameter yang obyektif dan skala prioritas.

- b. Kualitas dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pemenuhan kebutuhan anggaran pengadilan, adanya revisi anggaran, proses pencairan anggaran yang lebih terjadwal, adanya penentuan skala prioritas penggunaan anggaran dan lain sebagainya.

VISI dan MISI

Salah satu syarat agar organisasi Mahkamah Agung ini dapat berjalan dengan baik adalah adanya suatu **VISI dan MISI**.

Adapun **Visi Mahkamah Agung RI** (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:



VISI MAHKAMAH AGUNG:

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

MISI MAHKAMAH AGUNG:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam menunjang dan mendukung serta mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung, telah melakukan langkah-langkah konkrit mewujudkan visi dan misinya, yaitu:

Visi Pengadilan Tinggi Makassar adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Makassar Yang Agung"

Sedangkan bersamaan dengan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga mempunyai Misi, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar

BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PELAYANAN HUKUM

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) dan Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Berikut ini rincian keadaan perkara Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2022.

Tabel II.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT PERTAMA			
			SISA 2021	MASUK 2022	PUTUS 2022	SISA 2022
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	395	1707	1774	328
		Pidana Anak	2	98	93	7
		Pidana Tipikor	42	117	115	44
		Pidana Lalu Lintas	0	11371	11371	0
		Perdata	230	505	429	306
		PHI	13	40	36	17
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	65	418	425	58
		Pidana Anak	7	24	24	7
		Pidana Lalu Lintas	0	2197	2197	0
		Perdata	46	283	288	41
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	18	86	92	12
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	1637	1637	0
		Perdata	19	22	34	7

4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	5	87	92	0
		Pidana Anak	0	5	5	0
		Pidana Lalu Lintas	0	726	726	0
		Perdata	10	102	108	4
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	2	139	121	20
		Pidana Anak	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	917	917	0
		Perdata	9	115	102	22
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	4	174	164	14
		Pidana Anak	0	22	22	0
		Pidana Lalu Lintas	0	759	759	0
		Perdata	21	135	135	21
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	25	106	122	9
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	399	399	0
		Perdata	7	57	54	10
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	7	173	180	0
		Pidana Anak	0	5	5	0
		Pidana Lalu Lintas	0	1199	1199	0
		Perdata	12	123	123	12
9	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	28	257	259	26
		Pidana Anak	0	17	17	0
		Pidana Lalu Lintas	0	1515	1515	0
		Perdata	14	58	51	21
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	36	263	246	53
		Pidana Anak	0	12	12	0
		Pidana Lalu Lintas	0	654	654	0
		Perdata	17	134	142	9
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	29	342	339	32
		Pidana Anak	0	8	7	1
		Pidana Lalu Lintas	0	1036	1036	0

		Perdata	21	51	59	13
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	19	101	111	9
		Pidana Anak	0	10	10	0
		Pidana Lalu Lintas	0	957	957	0
		Perdata	5	11	14	2
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	33	203	189	47
		Pidana Anak	0	3	3	0
		Pidana Lalu Lintas	0	2442	2442	0
		Perdata	26	38	44	20
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	5	144	148	1
		Pidana Anak	1	7	8	0
		Pidana Lalu Lintas	0	739	739	0
		Perdata	3	41	43	1
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	16	108	112	12
		Pidana Anak	0	8	8	0
		Pidana Lalu Lintas	0	89	89	0
		Perdata	4	14	13	5
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	30	206	204	32
		Pidana Anak	1	11	11	1
		Pidana Lalu Lintas	0	984	984	0
		Perdata	13	250	249	14
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	9	49	57	1
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	351	351	0
		Perdata	5	11	11	5
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	25	193	192	26
		Pidana Anak	0	21	21	0
		Pidana Lalu Lintas	0	397	397	0
		Perdata	7	36	28	15
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	19	142	140	21
		Pidana Anak	0	17	17	0

		Pidana Lalu Lintas	0	955	955	0
		Perdata	60	249	263	46
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	11	134	126	19
		Pidana Anak	0	4	4	0
		Pidana Lalu Lintas	0	676	676	0
		Perdata	7	222	223	6
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	16	160	149	27
		Pidana Anak	0	10	10	0
		Pidana Lalu Lintas	0	930	930	0
		Perdata	13	72	64	21
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	19	125	122	22
		Pidana Anak	1	6	7	0
		Pidana Lalu Lintas	0	1478	1478	0
		Perdata	7	93	87	13
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	13	59	58	14
		Pidana Anak	0	5	4	1
		Pidana Lalu Lintas	0	84	84	0
		Perdata	8	15	15	8
TOTAL			287	8207	8184	310

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima, meneliti, memeriksa dan memutus perkara banding pidana, perdata dan perkara Tindak pidana korupsi yang diajukan, oleh Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan terdiri dari 24 (dua puluh empat) Satker. Berkas perkara yang dimohon banding adalah Perkara Perdata Gugatan, untuk Perkara Pidana terdiri Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas serta Pidana Khusus Tipikor.

Dalam Tahun 2022 keadaan perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.2.
Keadaan Perkara Perdata Tingkat Banding Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT BANDING			
			SISA 2021	MASUK 2022	PUTUS 2022	SISA 2022
1	Pengadilan Tinggi Makassar	Pidana	103	942	945	100
		Pidana Anak	1	33	34	0
		Pidana Tipikor	0	42	42	0
		Perdata	51	482	453	80
2	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	5	190	176	19
		Pidana Anak	0	15	14	1
		Pidana Tipikor	0	41	41	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	24	166	159	31
		PHI	0	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	2	54	46	10
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	41	35	11
4	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	4	20	19	5
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	13	11	3
5	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	1	8	2	7
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	8	7	1
6	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	14	26	27	13
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	10	13	

7	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	10	14	19	5
		Pidana Anak	0	5	5	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	12	22	22	12
8	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	1	32	28	5
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	10	6	4
9	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	11	46	45	12
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	6	7	0
10	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	9	77	68	18
		Pidana Anak	0	2	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	13	12	1
11	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	6	90	82	14
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	3	7	0
12	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	0	49	43	6
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	13	29	14	2
13	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	1	23	24	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	5	4	1
14	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	5	28	22	11
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	10	18	25	3
15	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	4	14	10	8
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	4	0
16	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	2	46	39	9
		Pidana Anak	0	2	2	0

		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	4	0
17	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	7	63	57	13
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	14	10	7
18	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	6	16	19	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	4	5	1
19	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	7	14	20	1
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	6	7	2
20	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	4	8	9	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	14	34	33	15
21	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	1	5	4	2
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	1	2	2
22	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	1	14	15	0
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	8	7	4
23	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	2	12	10	4
		Pidana Anak	1	3	3	1
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	5	5	1
24	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	0	12	11	1
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	10	10	2
TOTAL			64	287	280	71

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima, meneliti, memeriksa dan memutus perkara banding pidana, perdata dan perkara Tindak pidana korupsi yang diajukan, oleh Pengadilan Negeri Se Sulawesi Selatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Satker. Berkas perkara yang dimohon banding adalah Perkara Perdata Gugatan, untuk Perkara Pidana terdiri Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas serta Pidana Khusus Tipikor sebagai berikut keadaan perkara tingkat Kasasi dari wilayah hukum Pengadilan tinggi makassar

Dalam Tahun 2022 keadaan perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Tinggi Makassar secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.3.
Keadaan Perkara Perdata Tingkat Kasasi Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT KASASI			
			SISA 2021	MASUK 2022	PUTUS 2022	SISA 2022
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	16	132	114	34
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Tipikor	0	36	33	3
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	29	71	76	24
		PHI	3	19	0	22
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	32	26	8	50
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	43	34	24	53
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	15	17	23	9
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	6	2	5
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	2	4	5	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	7	1	6
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	0	14	3	11
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	13	8	11
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	4	14	13	5
		Pidana Anak	0	4	4	0

		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	14	17	8	23
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	2	24	15	11
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	11	1	7	5
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	39	27	42	24
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	6	8	6	8
9	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	11	38	20	29
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	15	14	1
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	28	68	73	23
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	13	4	7	10
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	6	23	13	16
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	16	0	17
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	2	18	13	7
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	2	1	3
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	11	27	22	16
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	23	16	22	17
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	8	7	4	11
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	4	7	4
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	18	25	28	15
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	2	3	1

16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	20	44	30	34
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	7	0	12
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	3	14	12	5
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	11	5	3	13
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	6	15	16	5
		Pidana Anak	2	0	2	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	8	4	7	5
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	2	11	8	5
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	14	25	15	24
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	1	2	2	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	2	4	3
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	1	12	2	11
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	9	4	4	9
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	0	9	5	4
		Pidana Anak	0	1	1	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	2	4	3
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	1	10	8	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	9	5	6	8
TOTAL			129	205	169	165

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Berikut ini rincian keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2022 :

Tabel II.4.
Keadaan Perkara Perdata Tingkat Peninjauan Kembali Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA		TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI			
			SISA 2021	MASUK 2022	PUTUS 2022	SISA 2022
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	1	11	9	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Tipikor	0	16	12	4
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	16	44	0	60
		PHI	0	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	2	1	2	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	5	19	10	14
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	2	0	2
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	2	1	1
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	5	3	4
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	1	1	1
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	11	5	7

8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	1	2	0	3
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	2	0	2
9	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	1	1	1	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	7	6	9	4
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	3	0	3	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	4	3	2
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	10	5	5
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	0	0	0
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	4	3	4	3
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	1	1	1
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	0	2	0
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	1	0	1
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0

		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	0	0	0
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	1	0	0	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	5	3	3
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	0	1	1	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	2	11	7	6
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	1	0	1	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	0	0	0
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	3	4	4	3
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	0	1	0	1
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	0	0	0	0
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	0	0	0	0
		Pidana Anak	0	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
		Perdata	1	3	3	1
TOTAL			12	27	22	17

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Dalam Tahun 2022 keadaan Sisa perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar yang diputus secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II. 5. Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Makassar Yang Diputus Tahun 2022

PERKARA	SISA 2021	MASUK	PUTUS	SISA 2022	KET
PERDATA	51	482	453	80	
PIDANA	103	942	945	100	
TIPIKOR	0	42	42	0	
PIDANA ANAK	1	33	34	0	
JUMLAH	155	1499	1474	180	

Dari tabel di atas terlihat bahwa sisa perkara tahun 2021 sejumlah 155 perkara terdiri dari 51 perkara perdata, 103 perkara pidana, perkara tipikor nihil serta perkara pidana anak 1 seluruh sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2022. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan keadaan Sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada Tahun 2022 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.6. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 Pengadilan Tingkat Pertama yang di Putus Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	SISA 2022
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana
		Pidana Anak
		Pidana Tipikor
		Pidana Lalu Lintas
		Perdata
		PHI
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana
		Pidana Anak
		Pidana Lalu Lintas
		Perdata
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana
		Pidana Anak
		Pidana Lalu Lintas
		Perdata

4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	0
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	4
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	20
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	22
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	14
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	21
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	9
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	10
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	0
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	12
9	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	26
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	21
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	53
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	9
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	32
		Pidana Anak	1
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	13
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	9
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	2
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	47
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	20
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	1
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	1
15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	12
		Pidana Anak	0

		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	5
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	32
		Pidana Anak	1
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	14
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	1
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	5
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	26
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	15
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	21
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	46
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	19
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	6
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	27
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	21
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	22
		Pidana Anak	0
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	13
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	14
		Pidana Anak	1
		Pidana Lalu Lintas	0
		Perdata	8
TOTAL			1483

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Tahun 2022 keadaan perkara banding Pengadilan Tinggi Makassar yang diputus tepat waktu secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II.7. Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Makassar yang Diputus Tepat Waktu

NO	SATUAN KERJA		JUMLAH PERKARA PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU
1	Pengadilan Tinggi Makassar	Pidana	945	945
		Pidana Anak	34	34
		Pidana Tipikor	42	42
		Perdata	453	453

Seluruh Perkara Pidana, Pidana Anak, Pidana Tipikor dan Perdata yang putus di Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Makassar diputus tepat waktu.

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Dari tabel berikut ini dapat dilihat bahwa perkara pada 23 (dua puluh tiga) Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan jumlah perkara yang putus di tahun 2022 yang tidak mengajukan Banding, Kasasi maupun PK sebagai berikut:

Tabel II. 8. Rekapitulasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA		BANDING	KASASI	PK
1	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana	1584	58	121
		Pidana Anak	78	93	93
		Pidana Tipikor	100	79	99
		Pidana Lalu Lintas	1371	1371	1371
		Perdata	263	358	429
		PHI	33	17	33
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Pidana	371	399	424
		Pidana Anak	23	24	24
		Pidana Lalu Lintas	2197	2197	2197
		Perdata	247	254	273
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Pidana	70	77	0
		Pidana Anak	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	1637	1637	1637
		Perdata	21	18	30
4	Pengadilan Negeri Barru	Pidana	91	94	99
		Pidana Anak	4	5	6
		Pidana Lalu Lintas	726	726	726
		Perdata	5	5	0
5	Pengadilan Negeri Takalar	Pidana	90	107	119
		Pidana Anak	3	3	3

		Pidana Lalu Lintas	0	0	917
		Perdata	82	86	90
6	Pengadilan Negeri Maros	Pidana	155	150	164
		Pidana Anak	17	3	7
		Pidana Lalu Lintas	759	759	759
		Perdata	27	32	48
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	Pidana	98	106	0
		Pidana Anak	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	36	44	36
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	Pidana	134	153	178
		Pidana Anak	4	5	5
		Pidana Lalu Lintas	1199	1199	1199
		Perdata	117	115	121
9	Pengadilan Negeri Sidrap	Pidana	183	220	259
		Pidana Anak	8	8	8
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	38	3	14
10	Pengadilan Negeri Pinrang	Pidana	149	15	0
		Pidana Anak	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	25	5	5
11	Pengadilan Negeri Watampone	Pidana	293	318	0
		Pidana Anak	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	22	35	41
12	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Pidana	88	72	72
		Pidana Anak	10	10	10
		Pidana Lalu Lintas	957	957	957
		Perdata	57	55	55
13	Pengadilan Negeri Sengkang	Pidana	161	162	0
		Pidana Anak	0	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	26	2	13
14	Pengadilan Negeri Bantaeng	Pidana	134	141	148
		Pidana Anak	8	8	8
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	40	39	42

15	Pengadilan Negeri Sinjai	Pidana	66	87	0
		Pidana Anak	7	6	0
		Pidana Lalu Lintas	89	89	0
		Perdata	10	11	0
16	Pengadilan Negeri Bulukumba	Pidana	164	169	213
		Pidana Anak	10	10	10
		Pidana Lalu Lintas	984	984	984
		Perdata	203	208	214
17	Pengadilan Negeri Selayar	Pidana	41	42	57
		Pidana Anak	2	2	2
		Pidana Lalu Lintas	351	351	351
		Perdata	7	6	0
18	Pengadilan Negeri Palopo	Pidana	178	177	0
		Pidana Anak	20	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	22	25	0
19	Pengadilan Negeri Makale	Pidana	132	129	139
		Pidana Anak	17	16	17
		Pidana Lalu Lintas	955	955	955
		Perdata	223	232	246
20	Pengadilan Negeri Masamba	Pidana	121	122	126
		Pidana Anak	4	4	4
		Pidana Lalu Lintas	676	676	676
		Perdata	222	221	223
21	Pengadilan Negeri Malili	Pidana	132	138	0
		Pidana Anak	9	10	10
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	56	60	60
22	Pengadilan Negeri Belopa	Pidana	110	113	121
		Pidana Anak	4	6	7
		Pidana Lalu Lintas	1478	1478	1478
		Perdata	82	85	87
23	Pengadilan Negeri Enrekang	Pidana	46	11	0
		Pidana Anak	3	0	0
		Pidana Lalu Lintas	0	0	0
		Perdata	5	4	3
TOTAL			6469	6466	6025

4. Jumlah Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Jumlah perkara perdata selama tahun 2022 yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel II.9. Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi

NO	SATUAN KERJA	Total	Berhasil
1	Pengadilan Negeri Makassar	469	9
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	83	2
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	22	2
4	Pengadilan Negeri Barru	8	-
5	Pengadilan Negeri Takalar	42	1
6	Pengadilan Negeri Maros	36	1
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	34	2
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	15	2
9	Pengadilan Negeri Enrekang	15	1
10	Pengadilan Negeri Sidrap	33	5
11	Pengadilan Negeri Pinrang	16	-
12	Pengadilan Negeri Watampone	39	-
13	Pengadilan Negeri Watansoppeng	11	9
14	Pengadilan Negeri Sengkang	28	4
15	Pengadilan Negeri Bantaeng	6	-
16	Pengadilan Negeri Sinjai	-	-
17	Pengadilan Negeri Bulukumba	36	-
18	Pengadilan Negeri Selayar	11	1
19	Pengadilan Negeri Palopo	20	-
20	Pengadilan Negeri Makale	69	-
21	Pengadilan Negeri Masamba	9	1
22	Pengadilan Negeri Malili	32	1
23	Pengadilan Negeri Belopa	18	1
TOTAL		1052	42

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Jumlah perkara anak selama tahun 2022 yang berhasil melalui Diversi di Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.10. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

NO	SATUAN KERJA	Total	Berhasil
1	Pengadilan Negeri Makassar	96	6
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	9	3
3	Pengadilan Negeri Pangkajene	-	-
4	Pengadilan Negeri Barru	2	-
5	Pengadilan Negeri Takalar	2	2
6	Pengadilan Negeri Maros	13	12
7	Pengadilan Negeri Jeneponto	-	-
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	1	1
9	Pengadilan Negeri Enrekang	1	1
10	Pengadilan Negeri Sidrap	7	6
11	Pengadilan Negeri Pinrang	2	-
12	Pengadilan Negeri Watampone	3	1
13	Pengadilan Negeri Watansoppeng	1	1
14	Pengadilan Negeri Sengkang	-	-
15	Pengadilan Negeri Bantaeng	7	1
16	Pengadilan Negeri Sinjai	-	-
17	Pengadilan Negeri Bulukumba	5	4
18	Pengadilan Negeri Selayar	6	5
19	Pengadilan Negeri Palopo	9	-
20	Pengadilan Negeri Makale	8	-
21	Pengadilan Negeri Masamba	-	-
22	Pengadilan Negeri Malili	2	2
23	Pengadilan Negeri Belopa	1	-
TOTAL		175	45

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

POSBAKUM

Layanan POSBAKUM yang diberikan tetap berpegang teguh kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan memanfaatkan fasilitas posbakum, masyarakat kurang mampu dapat melakukan konsultasi hukum, menerima advis hukum ataupun memperoleh bantuan mendapatkan draft hukum serta memperoleh informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberika layanan hukum secara gratis, dating ke Posbakum Pengadilan Negeri Setempat. Semoga layananan posbakum ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.

1. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
2. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
 - bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
 - bantuan pembuatan dokumen hukum;
 - advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
 - rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
 - rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
3. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
4. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Adapun Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar untuk Tahun 2022 yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum adalah sebagai berikut:

Tabel II.11. Realisasi Anggaran POSBAKUM

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	PT MAKASSAR	Nihil	Nihil	-
2	PN MAKASSAR	72,000,000	72,000,000	100%
3	PN SUNGGUMINASA	31,200,000	31,200,000	100%
4	PN TAKALAR	31,200,000	31,200,000	100%
5	PN JENEPONTO	31,200,000	31,200,000	100%
6	PN BANTAENG	31,200,000	31,200,000	100%
7	PN MAROS	24,000,000	23,400,000	97.50%
8	PN PANGKAJENE	24,000,000	24,000,000	100%
9	PN BARRU	31,200,000	31,200,000	100%
10	PN PAREPARE	31,200,000	31,200,000	100%
11	PN SIDRAP	24,000,000	24,000,000	100%
12	PN PINRANG	31,200,000	31,200,000	100%
13	PN ENREKANG	31,200,000	31,200,000	100%
14	PN WATANSOPPENG	31,200,000	31,200,000	100%
15	PN BULUKUMBA	31,200,000	31,200,000	100%
16	PN SELAYAR	31,200,000	31,200,000	100%
17	PN SINJAI	31,200,000	31,200,000	100%
18	PN WATAMPONE	31,200,000	31,200,000	100%
19	PN SENKANG	31,200,000	31,200,000	100%
20	PN PALOPO	31,200,000	31,200,000	100%
21	PN MAKALE	31,200,000	28,600,000	91.67%
22	PN MALILI	28,800,000	28,800,000	100%
23	PN MASAMBA	31,200,000	31,200,000	100%
24	PN BELOPA	24,000,000	24,000,000	100%
Total		727,200,000	724,000,000	99.53%

- **Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Sidang Keliling (circuit court) merupakan persidangan (layanan sidang) di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk dari Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu atau sulit menjangkau Pengadilan karena hambatan tertentu. Sidang Keliling juga merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan peradilan yang berada di bawahnya. Sidang Keliling merepresentasikan access to justice for all. Prosedur Sidang Keliling mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Prosedur dimaksud diatur dalam Pasal 14 - Pasal 21.

1. Prosedur Layanan Sidang Keliling

- a. Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang keliling (sidang di luar gedung Pengadilan) berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah;
- b. Lokasi penyelenggaraan sidang keliling dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain;
- c. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan sidang keliling secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
- d. Dalam menyelenggarakan sidang keliling secara terpadu, Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Instansi lain (Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga Lain) yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang keliling tersebut;
- e. Sidang keliling dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum. Pengadilan dan Posbakum Pengadilan melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang keliling dimaksud

2. Ruang Lingkup Sidang Keliling

Pengadilan Negeri dapat menyelenggarakan sidang keliling khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

3. Pengamanan Sidang Keliling

- a. Penyelenggaraan sidang keliling di daerah yang memiliki risiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan (Polri, TNI, atau unit pengamanan lainnya);
- b. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain atau unit keamanan setempat.

4. Lokasi sidang keliling

- a. Sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling pada kantor pemerintah setempat;
- b. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan Negeri, sidang keliling juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut;
- c. Ruangan dan lokasi sidang keliling harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia.

5. Petugas sidang keliling

Petugas sidang keliling terdiri dari:

- Hakim; dan
- Panitera Pengganti

Pelaksanaan sidang keliling juga dapat diikuti oleh Hakim Mediator / Mediator Independen, Jurusita, Satuan Pengamanan, Pejabat, Staf Pengadilan, dan Unsur Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai kebutuhan.

6. Pembiayaan dan Penganggaran sidang keliling

- Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri dan terdiri dari:
 - Biaya tempat persidangan (jika diperlukan);
 - Biaya perlengkapan sidang (jika diperlukan);
 - Biaya perjalanan dinas Hakim, Panitera, Jurusita, dan petugas lainnya.
- Dalam hal sidang keliling mengikut sertakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri, maka biaya perjalanan dinas mencakup juga untuk petugas Posbakum Pengadilan.
- Dalam hal ada petugas atau pihak lain selain petugas Posbakum Pengadilan yang ingin ikut dalam sidang keliling memberikan penyuluhan hukum, maka biaya perjalanan ditanggung sendiri oleh orang atau pihak lain tersebut

7. Mekanisme penggunaan anggaran sidang keliling

- Untuk kepentingan perencanaan, setiap Pengadilan Negeri menentukan anggaran sidang keliling berdasarkan perkiraan satuan biaya dan jumlah perkara dalam sidang keliling;
- Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan Negeri dapat menggunakan anggaran sidang keliling berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang keliling dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran sidang keliling yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan atau DIPA Pengadilan Negeri;
- Bendahara Pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban keuangan dan mencatat setiap pengeluaran dalam buku yang disediakan untuk itu.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk biaya Sidang Keliling/Pelayanan terpadu ada 3 (tiga) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel II.12. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Keliling Tahun 2022

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PN SELAYAR	95,000,000	95,000,000	100%
2	PN SINJAI	15,000,000	15,000,000	100%
3	PN MAKALE	21,100,000	20,640,000	98%
Total		131,100,000	130,640,000	99.65%

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Perdata (Prodeo)

a. Pengadilan Negeri setempat memberikan pelayanan permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) kepada pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
- Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Prosedur permohonan pembebasan biaya perkara:

- Permohonan diajukan secara tertulis oleh Penggugat/Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum perkaranya didaftar dan diregister di Kepaniteraan Muda Perdata.
- Untuk permohonan pembebasan biaya perkara perdata yang diajukan oleh Tergugat/Termohon dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- Jika berkas permohonan pembebasan biaya perkara dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Ketua Pengadilan Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Panitera, segera menerbitkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonannya.
- Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan Penggugat/Pemohon ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan penolakannya sehingga proses perkara baru dapat dilaksanakan setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara;
- Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri tersebut berlaku pula untuk perkara yang sama apabila Pemohon mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Apabila permohonan pembebasan biaya perkara tersebut baru diajukan untuk pertama kalinya oleh Pemohon pada tingkat banding, kasasi atau Peninjauan Kembali, maka:
 1. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat banding harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan atau diberitahukan kepadanya;

2. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat kasasi harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding diberitahukan kepadanya;
3. Permohonan pembebasan biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang terkait pengajuan Peninjauan Kembali.

Untuk wilayah pengadilan Tinggi Makassar Satuan Kerja yang mendapatkan anggaran untuk Prodeo ada 2 (dua) Pengadilan Negeri yaitu:

Tabel II.16. Alokasi dan Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2022

NO	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN		PERSEN REALISASI
		PAGU	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	
1	PN MAKASSAR	3,150,000	2,420,000	76.83%
2	PN WATANSOPPENG	1,580,000	980,000	62.02%

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Tinggi Makassar, sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Banding, berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, diberi beban untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi aparatur Peradilan Umum yang ada di Sulawesi Selatan, baik yang menyangkut tenaga Teknis Yudisial maupun tenaga Non Teknis Yudisial.

Secara keseluruhan, jumlah personil yang menjadi binaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Makassar **1204** (seribu dua ratus empat) orang, dengan rincian sebagaimana tersebut pada TABEL III.1 dan TABEL III.2 dan rekapitulasinya adalah sebagai berikut

Tabel III.1. Rekap Personil Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022

NO.	URAIAN JABATAN	JUMLAH		KET
		TERISI	KOSONG	
1	Pimpinan Pengadilan (Ka / Wk)	40	7	
2	Hakim Tinggi / Hakim / Cakim	206	7	
3	Struktural Kepaniteraan	90	17	
4	Panitera Pengganti	180	9	
5	Kejurusitaan (JS / JSP)	92	15	
6	Struktural Sekretariat	85	17	
7	Fungsional tertentu	45	20	
8	Staf	177	47	
9	Tenaga Honorer	289	-	
JUMLAH		1.204	139	

Dari Tabel III.1 tersebut, maka dapatlah diketahui perbandingan jumlah tenaga Hakim dengan jumlah tenaga Fungsional Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sebagaimana tersebut pada Tabel. Dan dari Tabel ini, maka dengan berpedoman kepada Peraturan yang ada (Nomor: 140/KMA/SK/VIII/2013), yang menyebutkan bahwa Rasio Formasi perbandingan antara Majelis Hakim (artinya 3 orang Hakim) dengan Panitera Pengganti (Pejabat Fungsional Kepaniteraan).

Maka usulan dari Pengadilan Negeri untuk pengangkatan Panitera Pengganti baru, akan ditolak, demikian pula sebaliknya, bila berdasarkan data yang ada jumlah Panitera Pengganti masih kurang dan beban perkaranya relatif berat, maka usulan tersebut akan diterima dan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut/dimintakan persetujuan untuk pengangkatannya.

Atas pertimbangan ini, maka dilakukan mutasi tenaga Teknis dalam satu tahun (2022) seperti di tabel berikut :

MUTASI

Tabel III.2. Rekap Mutasi Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022

NO	PENGADILAN	MUTASI PIMPINAN			MUTASI HAKIM/HAKIM TINGGI			MUTASI KEPANTERAAN				MUTASI KEURUSITAN				MUTASI KESEKRETARIATAN			
		MASUK	KELUAR	PENSUN	MASUK	KELUAR	PENSUN	MASUK	KELUAR	PENSUN	BARU DILANTIK	MASUK	KELUAR	PENSUN	BARU DILANTIK	MASUK	KELUAR	PENSUN	BARU DILANTIK
1	PT MAKASSAR	0	0	0	14	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
2	PN MAKASSAR	1	1	0	10	10	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PN SUNGUMINASA	1	2	0	3	6	0	3	4	0	3	0	2	0	1	10	0	2	3
4	PN WATAMPONE	1	1	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	PN MAROS	1	1	0	1	1	0	6	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PN MAKALE	1	1	0	1	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0
7	PN PALOPO	0	0	1	2	1	0	5	5	0	2	0	0	0	0	3	0	0	3
8	PN SENGKANG	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
9	PN BULUKUMBA	2	2	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0
10	PN PANGKAJENE	1	1	0	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
11	PN BARRU	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
12	PN PAREPARE	1	1	0	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
13	PN SIDRAP	2	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PN PINRANG	1	1	0	0	2	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
15	PN TAKALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PN JENEPONTO	2	1	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	PN BANTAEANG	1	1	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18	PN SINJAI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
19	PN WATANSOPPENG	2	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20	PN SELAYAR	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
21	PN MALILI	1	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	PN MASAMBA	1	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PN ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PN BELOPA	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Mutasi Keluar

Yang dimaksud mutasi keluar adalah pindahan dari keluar Sulawesi Selatan atau keluar PN dalam wilayah Sulawesi Selatan akan tetapi dengan kedudukan yang sama di PN yang lama maupun yang baru.

Tabel III.3. Mutasi Keluar Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP PANGKAT	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA	KET
1	PT MAKASSAR	MAKKASAU, S.H., M.H. NIP. 195712311984011007 Pembina (IV/e)	HAKIM TINGGI PT. BANDUNG	HAKIM TINGGI PT. MAKASSAR	
		EFENDI PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 195803041985031003 Pembina (IV/e)	HAKIM TINGGI PT. BANTEN	HAKIM TINGGI PT. MAKASSAR	
		HERDIYANTO, S.Kom. NIP. 198605202009041006 Penata Tingkat I (III/d)	SEKRETARIS PN MAROS	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	
2	PN MAKASSAR	TITO SUHUD, S.H., M.H. NIP.19640721 199212 1 001/PEMBINA UTAMA MADYA	KETUA PN JAKARTA TIMUR	KETUA PN MAKASSAR	
		DANIEL PRATU, S.H./NIP.196103281983031003/ PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM TINGGI PT AMBON	HAKIM PN MAKASSAR	
		RIYANTO ALOYSIUS, S.H., M.H./NIP.19620515 199212 1 001/PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM PN BANDUNG	HAKIM PN MAKASSAR	
		RIKA MONA P., S.H., M.H./NIP. 19671026 199212 2 001/PEMBINA UTAMA MADYA	HAKIM PN JAKARTA SELATAN	HAKIM PN MAKASSAR	
		BASUKI WYONO, S.H., M.H./NIP. 19660418 199603 1 001/PEMBINA UTAMA MUDA	HAKIM PN BEKASI	HAKIM PN MAKASSAR	
		Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H./NIP. 19650824 198503 1 002/PEMBINA UTAMA MUDA	HAKIM PN JAKARTA PUSAT	HAKIM PN MAKASSAR	
		ACHMAD RASJID, S.H./NIP. 19740915 200003 1 001/PEMBINA TK. I (IV/b)	WAKIL PN TARAKAN	HAKIM PN MAKASSAR	
		Dr. ST. NAISJIAH, S.H., M.H./NIP. 19680627 199203 2 002/PEMBINA TK. I (IV/b)	PANITERA PN PARE PARE	PANITERA MUDA PERDATA PN MAKASSAR	
		ANDI HAJERAWATI, S.H. / NIP. 19641231 198703 2 026/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA MUDA PIDANA PN MAKASSAR	
		SURHATTA, S.H./NIP. 19631231 198203 1 019/ PENATA TK. I (III/d)	PANITERA PENGGANTI PT MAKASSAR	PANITERA MUDA PHI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	
		MUHAMMAD ILYAS, S.H./NIP. 19750513 200112 1 003/PENATA TK. I (III/d)	PANITERA MUDA HUKUM PN MAROS	PANITERA PENGGANTI PN MAKASSAR	

3	PN SUNGGUMINASA	HEBBIN SILALAH, S.H., M.H./NIP 19610923 198303 1 005/PANGKAT IV/d	HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK	KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		RIDWAN, S.H., M.H./NIP 19690706 199603 1 002/PANGKAT IV/c	WAKIL KETUA PENGADILAN BALE BANDUNG	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		SIGIT TRIATMOJO, S.H./NIP 19791016 200502 1 002/PANGKAT IV/a	HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		HENU SISTHA ADITYA, S.H., M.H./NIP 19790524 200502 1 001/PANGKAT IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		MUHAMMAD SYAWALUDDIN, S.H., NIP. 19790911 200312 1 001, PANGKAT IV/a	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		AMIRUDDIN MAHMUD, S.H., M.H., NIP. 19830910 200704 1 001, PANGKAT III/d	HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		YULIANTI MUHIDIN, S.H., NIP. 19750616 200604 2 002, PANGKAT III/d	HAKIM PENGADILAN WATAMPONE	HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		MARWATY, S.H., NIP. 19630814 198602 2 001, PANGKAT III/d	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PANITERA MUDA HUKUM	
		SISWATY, S.H., 19840124 200912 2 002, PANGKAT III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		ABD. LATIF, S.H., NIP. 19650920 199003 1 002, PANGKAT III/D	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	PANITERA MUDA PIDANA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		SEPTIAWATI, S.H., NIP. 19790909 200904 2 003, PANGKAT III/d	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		ANDI ZAINUDDIN, S.H., NIP. 19820504 201101 1 014, PANGKAT III/c	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT	PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		BAMBANG ANDI SAPUTRO, S.Kom., NIP. 19890816 201503 1 002, PANGKAT III/b	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN NEGERI WONOSARI	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
		M. JUMADIL, NIP. 19710909 201212 1 003, PANGKAT II/c	PENGADMINISTRAS I REGISTRASI	PENGADMINIST RASI	

			PERKARA (PERDATA) PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	REGISTRASI PERKARA (PERDATA) PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	
4	PN WATAMPONE	Surachmat,S.H., M.H. NIP. 196303291987031005 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	Wakil PN. Bandung	Ketua PN. Watampone	
		Hasmawati,S.H. NIP. 196401141984032001 PEMBINA (IV/a)	Panitera Pengganti PT. Makassar	Wakil Panitera PN. Watampone	
		I Dewa G. Budhy D.A., S.H., M.H. NIP. 197305201999031002 PEMBINA TK. I (IV/b)	Wakil PN. Bangkinang	Hakim PN.Watampone	
		B.U. Resa Syukur,S.H., M.H. NIP. 198106182003121001 PEMBINA (IV/a)	Hakim Mataram	Hakim PN.Watampone	
		Khaerunnisa, S.H. NIP. 197809292005022002 PENATA TK.I (III/d)	Hakim PN.Cibinong	Hakim PN.Watampone	
		Nurkautsar Hasan,S.H., M.H. NIP. 197904042005021002 PENATA TK.I (III/d)	Hakim PN. Jember	Hakim PN.Watampone	
		Abbas Lahamid, S.H. NIP. 196811111991031003 PENATA TK.I (III/d)	Panitera PN Barru	Panitera Muda Perdata	
		Jumadil,S.H., M.H. NIP. 198209032005021001 PENATA (III/c)	Panmud Hukum PN Sengkang	Panitera Pengganti PN.Watampone	
5	PN MAROS	R. Bemadette Samosir, SH., MH./ NIP. 196801181994032006/Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim PN Jakarta Pusat	Wakil Ketua PN Maros	
		Rubianti,SH., MH./NIP. 197901172002122002/ Pembina (IV/a)	Hakim PN Watampone	Hakim PN Maros	
		Fifiyanti, SH, MH. / NIP. 197710312002122007 / Pembina (IV/a)	Hakim PN Gresik	Hakim PN Maros	
		Mustamin, SH., MH./ NIP. 198308172009041010/ Penata Tk. I (III/d)	Hakim Yustisial Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administtras	Hakim PN Maros	
		Iswandi Andi Marzuki, SH. / NIP. 198109042009041005/ Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Niaga PN Makassar	Panitera Muda Hukum PN Maros	
		Andi Nirwan AY., SH./ NIP. 198704052009041003/ Penata (III/c)	Panitera Penganti PN Makassar	Panitera Pengganti PN Maros	
		Rosanny Novianty Nika, SH./ NIP. 198509302011012015/ Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Penganti PN Makassar	Panitera Pengganti PN Maros	
6	PN MAKALE	Timotius Djemey. S.H./ NIP. 196008251994031001/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim PN Makassar	Ketua Pn makale	

		Surya Laksemana, S.H./ NIP. 197701312001121002/ Pembina (IV/a)	Hakim PN balik papan	Hakim	
		Annender Carnova, S.H., M.Hum/ NIP.198104132006041004/ Penata Tingkat I (III/d)	Hakim PN balik papan	Hakim	
		Chairil Anwar, S.H., M.Hum./ NIP.196808301996031002 / Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua PN Palu	Ketua	
		Anita Farhan, S.H./ NIP.198212092006042001 / penata tk i(III/d)	Panitera Pengganti Pn Sungguminasa	panitera pengganti	
		Ahmad Yani Tamher, S.H./19840924 200704 1 001 /penata tk i(III/d)	Hakim Pt ambon	Hakim	
7	PN PALOPO	Erwino M Amahorseja, S.H / NIP. 197306212005021001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		Raden Nurhayati, S.H.,M.H / NIP. 197808072002122003 Pembina (IV/a)	Hakim	Hakim	
		Vredy Ichsany, S.H / NIP. 198607262019031003 Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Analisis Perkara Peradilan	
8	PN SENGKANG	Fery Haryanta, S.H./19650421199603 1003/Pembina Utama Muda(IV/C)	KETUA	KETUA	
		Andi Nurmawati, S.H./1974080719990 32002/Pembina TK.1 (IV.b)	KETUA	WAKIL	
		Bustan jaya, S.H./196204031983031003/ Penata TK.1 (III/d)	Panitera muda hukum	Panitera muda hukum	
		Eka Herfiani, S.H./198208112009042 006/Penata Muda TK.1(III/b)	Panitera muda pidana	panitera pengganti	
		Andi Iriana d. Sulolipu, S.H./198908212014032 006/Penatan Muda TK.1(III.b)	Panitera Penganti	Analisis Perkara Peradilan	
		M.Akram, S.H., M.H./1989021020 14031001/Penata Muda TK.1 (III/b)	Panitera Penganti	Panitera Penganti	
		Shidq Arif Siwantoko, A.Md.,kom/Pengatur (III/c)	Staf PN Maros	Staf PN Sengkang	
9	PN BULUKUMBA	Uwaisqami, SH./198003262007041001/ Penata Tk. I/III.d	Hakim PN Tenggara	Hakim PN Bulukumba	
		Iwan Harry Wnarto, SH.MH /197012171992031002/Pembina Tk. I /IV.b	Hakim PN Sragen	Hakim PN Bulukumba	
		Nursinah, SH. MH./197305022006042001/ Penata Tk. I /III.d	HAKIM PN Kenadari	Hakim PN Bulukumba	
		Akhmad Basir, SH./197601312001121003/ Penata III.c	Panmud Pidana PN Bantaeng	PP PN Bulukumba	

		Nawir, SH./197202041993031002/Pen ata III.c	Panmud Perdata PN Sungguminasa	Panmud Hukum PN Bulukumba	
		Sera Achmad, SH. MH. / 197910252005022001/ Pembina IV.a	Hakim PN Kendari	Hakim PN Bulukumba	
		Khoiruman Pandu K. Harahap, SH.MH./197508161999031003/ Pembina TK. I /IV.b	WKPN Sukoharjo	KPN Bulukumba	
10	PN PANGKAJENE	FARID HIDAYAT SOPAMENA, SH., MH / NIP. 19760214 200112 1 004 / Pembina TK.I /IV.b	Ketua PN Pangkajene	Hakim PN Makassar	
11	PN BARRU	CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH / Nip.197411052001121004/ Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua PN Barru	Wakil Ketua PN Manokwari	
		HJ. ST. NORMAH, SH / Nip. 1963032011985032004 (III/d)	Panitera	PP Pengadilan Tinggi Makassar	
		HENGKI KURNIAWAN, SH. MH / Nip. 198012222002121002/ Pembina (IV/a)	Wakil Ketua PN Barru	Wakil Ketua PN Pacitan	
12	PN PAREPARE	SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H./NIP. 197705262000122002/Pembina (IV/a)	Hakim PN Makassar	Ketua PN Parepare	
		HASMA H., S.E.,S.H./NIP. 196805151992032002/Penata Tk.I (III/d)	Panitera PN Pinrang	Panitera PN Parepare	
13	PN SIDENRENG RAPPANG	-	-	-	
14	PN PINRANG	ADIL KASIM,S.H.,M.H/197511122001 121002/Pembina (IV/a)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba kelas IB	Ketua	
		ANDI NUR HASWAH,S.H/19811216200805 2001	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Hakim	
		ANDI AQSHA,S.H/198201302007041 001/Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pengadilan Negeri Tuban Kelas IB	Hakim	
		ANDI MUHAMMAD REFILL,S.H/1969011419890310 01/Penata Tk.I (III/d)	Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB	Panitera	
		LEILA MASDANI HARAPAH,S.KOM/1988050720 15032001/Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf Pengadilan Tinggi Medan	Staf PTIP	
15	PN TAKALAR	Hj.Aisyah Adama,S.H.,M.H 198506302009042010 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Sengkang	
		Nurrachman Fuadi,S.H.,M.H 198512172009121004 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Wonosari	
		Ria Handayani,S.H.,M.H 198303012009122001 Penata (III/c)	Hakim PN Takalar	Hakim PN Bulukumba	
16	PN JENEPONTO	ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum. 19760829 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim PN Malang	KETUA	

		RIZAL TAUFANI, S.H., M.H. 19770407 200312 1 001 Pembina (IV/a)	Ketua PN Koba	Wakil Ketua	
17	PN BANTAENG	Imran Marannu Iriansyah, S.H. 198404212009041004 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Tarakan	Hakim PN Bantaeng	
		Waode Sangia, S.H. 198007232008052001 Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Bau-bau	Hakim PN Bantaeng	
		Ujang Irfan Hadiana, S.H. 197805292002121005 Pembina (IV/a)	Hakim PN Bale Bandung	Ketua PN Bantaeng	
18	PN SINJAI	Andi Muh Amin AR, S.H./198502282009041008/ Penata Tk.I (III/d)	Hakim	Hakim	
		AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, S.H., M.Hum / 197602072001121003	Hakim	Ketua	
19	PN WATANSOPPENG	RAKHMAD DWINANTO, S.H., M.H. / 197704292002121003 / (IV/a)	Wakil Ketua	Ketua PN Nunukan	
		AHMAD ISMAIL, S.H., M.H. / 197412162000121001 / (IV/b)	Ketua	Wakil Ketua PN Palopo	
		H. MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H. / 196211021983111001 / (IV/a)	Panitera	Panitera Pengganti PT Makassar	
		SULAEMAN, S.H. / 197112311992031017 / (III/d)	Panitera Muda Pidana	Panitera Muda Hukum	
		NURFADHILAH, S.H. / 198802102011012013 / (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti PN Sinjai	
		FITRIANA, S.H., M.H. / 198311202007042001 / (III/d)	Hakim	Hakim PN Bulukumba	
20	PN SELAYAR	MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, SH. MH/197705272002121004/ Pembina (IV. a)	Hakim	Ketua PN Selayar	
21	PN MALILI	KHAIRUL, S.H.,M.H./ 197911132002121003 Pembina Tk.I (IV/d)	Wakil PN Maros	Ketua PN Malili	
		Andi Muhammad Ishak, S.H./ 198407152008051001/ Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Lamongan Kelas IB	Hakim PN Malili	
		Mahyudin, S.H./198203152008051001/ Penata Tk.I (III/d)	Hakim PN Kediri Kelas IB	Hakim PN Malili	
		Reno Hanggara, S.H./198603212009121005/ Penata (III/c)	Hakim PN Sumbawa Besar	Hakim PN Malili	
		Novalista Ratna Hakim,S.H., M.H./ 198611272011012024 Penata (III/c)	Hakim PN Pangkep	Hakim PN Malili	
		ARMAN, S.H./ 197205301993031001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera PN Polewali Staf PN Sei Rampah	Panitera PN Malili	
		HARIYANTO VALENTINO TAMBUNAN, S.H. /198601102012121001 Penata (III/c)		Kepala Sub Bagian PN Malili	

22	PN MASAMBA	OKI BASUKI RACHMAT, SH., MM., MH./ 197510252001121004/ Pembina(IV/a)	KETUA PN BANGKALAN	KETUA PN MASAMBA	
23	PN ENREKANG	Karsena, S.H., M.H./197204271993031003	Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II	Wakil Ketua Sumbawa Besar Kelas IB	
24	PN BELOPA	I MADE YULIADA, S.H.,M.H.	HAKIM PN DENPASAR	KETUA PN BELOPA	
		TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H.	KETUA PN PINRANG	WAKIL KETUA PN BELOPA	
		MUHLISIN, S.H.	HAKIM PN NGAWI	HAKIM PN BELOPA	
		FIRMANSYAH, S.H.,M.H.	HAKIM PN KAB. MADIUN	HAKIM PN BELOPA	
		MUSLIMIN, S.H.	PANITERA PN WATANSOPPENG	PANITERA PN BELOPA	
		DURIANA DUDY PIRY	STAF HUKUM PN ENREKANG	STAF HUKUM PN BELOPA	

PROMOSI

Promosi Jabatan

Yang dimaksud Promosi Jabatan adalah Mutasi dengan kenaikan jabatan, baik dari luar Sulawesi Selatan maupun ke luar Sulawesi Selatan atau dari dan ke Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan sendiri.

Tabel III.4. Promosi Jabatan Tahun 2022

N O	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	PROMOSI MENJADI	KET
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	Faisal Nur, S.H. / 199004182015031001	Analisa Perkara Peradilan	Panitera Pengganti PN Maros	
		HERDIYANTO, S.Kom./ 198605202009041006	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris PN Maros	
		YUSI TRIANY SINAGA, S.E., M.H./ 198405232006042002	Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran	Kasubag Rencana Program dan Anggaran PT Makassar	
		AHYADI JUSAEMAN, S.E., M.Si./ 199102022015031005	Kasubab PTIP PN Soppeng	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Makassar	
		AISYA RIZKI ASTARI, S.Kom / 199603072020122013	PNS/ Calon Pranata Komputer	Pranata Komputer	

		DEVITA KURNIA SARI, A.Md./ 199712012020122004	PNS/ Calon Arsiparis	Arsiparis	
2	PN MAKASSAR	NITA AYU WULANDARI, S.Kom.	PNS/ Calon Pranata Komputer	Pranata Komputer	
		Frlia Dinda Ismiyati A.Md.F	PNS/ Calon Arsiparis	Arsiparis	
3	PN SUNGUMINASA	Achmad Khoirul Annuwar, S.Kom	PNS/Calon Pranata Komputer	Pranta Komputer Ahli Pertama	01 Agus tus 2022
		Sahrir	Staf Pidana	Jurusita Pengganti	08/1 2/20 22
		Meirissa Nilawaty, S.Sos	Staf Umum dan keuangan	Kasub Bag Umum dan Keuangan	08 Febr uari 2022
		SEPTIAWATI, SH	Panitera Muda PN I B pada Pengadilan Negeri Bulukumba Klas IB	Panitera Muda PN I A pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas IA	18- Nov- 22
		ANDI SITI NURASIAWATI, SH.	Panitera Muda PN I B pada Pengadilan Negeri Maros Klas IB	Panitera Muda PN I A pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas IA	14/0 2/20 22
		Musdalifah Musllimin, SH	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus	Panitera Muda PN I A pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas IA	18- Nov- 22
		ICHSAN ARNAN, S.Kom., S.H., M.H.	Pranata Komputer Muda pada Badan Urusan Administrasi - Instansi Pusat	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas IA	27 Juli 2022
		Nuriya Awad, SH	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan	Panitera Muda PN I A pada Pengadilan Negeri	18- Nov- 22

			Negeri Makassar Klas IA Khusus	Sungguminasa Klas IA	
4	PN WATAMPONE	Yulianti Arsyad, S.E.I./ 19840729 201408 2022/ (III/b)	Jurusita Pengganti	Kasubag Umum dan Keuangan PN.Watampone	11 Agus tus 2022
		Amalia Intan Safura, S.Kom / 19980718 202012 2002/ (III/a)	PNS/ Calon Pranata Komputer	Pranata Komputer	1 Agus tus 2022
		Fitria Nurjanah, A.Md /19920615 202012 2010 (II/c)	PNS/ Calon Arsiparis	Arsiparis	1 Agus tus 2022
		Sega Hendricus, S.H./ 19631110 199203 1000/ (IV/b)	Panitera	Panitera Muda Hukum PT.Kupang	28- Nov- 22
		Fitriah Ade Maya, S.H./ 19760929 200112 2000/ (IV/b)	Hakim	Wakil Ketua PN. Enrekang	Belu m MT.
		Mohammad Idris Moh. Amin/ 19681112 199003 1004 /(III/d)	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Pidana PT. Sulbar	14 Dese mber 2022
		Syamsuddin, S.H./ 19790707 201101 1005/ (III/c)	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum PN. Sengkang	Belu m MT.
5	PN MAROS	KHAIRUL, S.H., M.H / 1977911132002121003 / IV/b	Wakil Ketua PN Maros	Ketua PN Maros	
		MUHAMMAD ILYAS B., S.H / 197505132001121003 / III/d	PANITERA MUDA HUKUM	PANITERA MUDA PIDANA	
		RISAL, S.H / 198304212009121005/ III/a	ANALIS PERKARA PERADILAN	JURU SITA PENGANTI	
		DHEA ANANDA NABELLA, A.MD. / 199703052020122005/ II/c	Staf Kepaniteraan Hukum	Fungsional Arsiparis	
		FRADIA MUNINGGAR FARARIT, S.KOM / 199312022020122011/ III/a	STAFF UMUM DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	
6	PN MAKALE	Rustam, S.H. M.H/ 197010111999031004/IVc	Ketua PN Makale IB	Wakil Ketua PN Gorontalo IA	
		Hendra Majid, S.H/198403052009041007/I IIb	PP PN Makale Kelas Ib	PP PN Makale Kelas IA	

		Alfian, S.H/ 197505212000121001	Ketua PN Malili Kelas II	Wakil Ketua Kelas IB PN Makale	
		Devi Angelina Boka, S.E/ 198705312009122002	Sekretaris PN Makale	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PT Sulbar	
7	PN PALOPO	Ahmad Ismail, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua	
		Tombi, S.H.	Panmud Hukum	Panmud Pidana	
		Abdul Rahman, A.Md.Kom.	Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran	
		Fadly Bakri, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Kasubbag PTIP	
		Danang Teguh Sri Hatmoko, S.Kom	Pranata Komputer	Pranata Komputer Ahli Pertama	
		Novelina Sarah, A.Md. A.B	Arsiparis	Arsiparis Terampil / Pelaksana	
8	PN SENGKANG	Hasrawati Yunus, S.H., M.H./ 197412311993032001/ Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		Ilham, S.H., M.H./ 197706302003121001/ Pembina Tk.I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn./ 197801082003121001/ Pembina (IV/a)	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II	
		Achmadi Ali, S.H./198209232009041005/ Penata Tk.I (III/d)	Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Kelas IA	
		Eka Herfiani, S.H./ 198208112009042006/ Penata (III/c)	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Watansoppeng Kelas II	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		Jumadil, S.H./ 198209032005021001/ Penata (III/c)	Panmud Hukum Pengadilan Negeri	Panmud Hukum Pengadilan	

			Sengkang Kelas IB	Negeri Watampone IA	
		Sudarmin, S.H. / 198602132014081001/ Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasub Bag. Kepegawaian Pengadilan Negeri Belopa Kelas II	Kasub Bag. Kepegawaian Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		Ilham Akbar, S.Kom/ 199301032020121009/ Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana	Pranata Komputer Ahli Pertama	
		Annisia Salsabila S.A, A.Md.S.I./ 199706292020122005/ Pengatur (II/c)	Staf Pelaksana	Arsiparis Terampil	
9	PN BULUKUMBA	Abdul Basyir, S.H.M.H./ 197208132005021001/ Pembina (IV/a)	Hakim Pratama Madya	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng	
		Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H.,M.H./ 198805112011011011/ Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya Pengadilan Enrekang	Hakim Pratama Madya Pengadilan Bulukumba Kelas I B	
		Armin, S.H.,M.H./ 196512311989031036/ Pembina Tk. I (IV.b)	Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A	
		Ernawaty, S.H.,M.H./ 197607292001122001/ Pembina Tk. I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Sindenreng Rappang	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	
		Andi Muhammad Refil, S.H.,M.H./ 196901141989031001/ Pembina (IV/a)	Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	
		Anggreani Triningsih, S.Kom/ 199702152020122007/ Penata Muda (III/a)	Analisis Tata Laksana	Pranata Komputer Ahli Pertama	
		Shelinda Oktaria, A.Md./ 199610112020122005/ Pengatur (II/c)	Pranata Kearsipan	Arsiparis Pelaksana	
		Rodding, S.H./ 196504151989031008/ Penata (II/c)		Panitera Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II	

		Septiawati, S.H./ 197909092009042003/ Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa	
		Syamsuddin S, S.H./ 197101012014081002/ Penata Muda (III/a)	Juru Sita Pengganti	Juru Sita	
		Junaedi, S.H.I./ 197003301993031001/ Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bantaeng	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	
		Isnawanti, S.H./ 198602092009122005/ Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	
		A. Dhadan Mirdan/ 198705052009121003/ Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Perkara	Juru Sita Pengganti	
		Dr. Yulius Simon, S.E.,M.M./ 198407012009121004/ Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
		Muhammad Alim Abadi, S.H./ 198611192012121001/ Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
10	PN PANGKAJENE	Ilham, SH., MH. / 197706302003121001 / Pembina Tingkat I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB	
		Ahya Adhitya SE, SH. / 198012272009121001 / Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros Kelas IB	

		H. Syahrudin, SH., MH. / 197304061993031001 / Penata Tk. I (III/d)	Panmud Perdata PN Pangkajene Kelas II	Panmud Perdata PN Maros Kelas IB	
		Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. / 198205122007042001 / Penata Tk. I (III/d)	Hakim PN Pangkajene Kelas II	Hakim PN Bojonegoro Kelas IB	
		Yusrimansyah, SH. / 198204142011011014 / Penata (III/c)	Hakim PN Pangkajene Kelas II	Hakim PN Sengkang Kelas IB	
		Sriwidayati, SH. / 198605262011012023 / Penata (III/c)	Hakim PN Pangkajene Kelas II	Hakim PN Maros Kelas IB	
		Sadar Suanna, SH / 196612301993031005 / Penata Tk. I (III/d)	Panitera PN Pangkajene Kelas II	Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
		Rijalul Haq, SE. /198001272006041002 / Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kelas II	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
11	PN BARRU	SETYORINI DYAH NURVITASARI, S.Kom /199301202020122009 / Penata Muda (III/a)	Staf Umum Keuangan PN Barru	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	0
		RESTU CHARUNIA RANAFITRI, A.Md / 199702252020122006 / Pengatur (II/c)	Staf Kepegawaian PN Barru	ARSIPARIS TERAMPIL/ PELAKSANA	
		SUARDI / 197301282014081003 / Pengatur Muda Tk I (II/b)	Pengadministra si Umum	JURUSITA PENGANTI	
12	PN PAREPARE	-	-	-	
13	PN SIDENRENG RAPPANG	FIKA APRILA MANDASARI, S.Kom / 19970415 202012 2 003	Pranata Komputer Pengadilan Negeri Sldrap	Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Negeri Sldrap	
		HJ. ULİYANA, SH / 19721008 200604 2 020	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sldrap	Jurusita Pengadilan Negeri Sldrap	
		NASRULLAH, SH / 19780713 201408 1 001	Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sldrap	Jurusita Pengadilan Negeri Sldrap	

14	PN PINRANG	RENNY, SH	Bendahara pengeluaran	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN TI, DAN PELAPORAN	
		HASBULLAH KALLA, SH	PANITERA PENGGANTI	PANITERA MUDA HUKUM POLEWALI	
		ARFAN, SH	PANITERA PENGGANTI	PANITERA MUDA HUKUM JENEPONTO	
		JUMADI APRI AHMAD, SH	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	KETUA PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG	
		YULI AGUSTINA	JURUSITA PENGGANTI	JURUSITA PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	
		NANANG FAUZI,S.KOM	Staf Pelaksana	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	
		SAHESTI NINGTYAS, Amd	Staf Pelaksana	ARSIPARIS TERAMPIL/ PELAKSANA	
		MUH.MUHAJIR SAMAD,Amd	Staf Pelaksana	JURUSITA PENGGANTI	
15	PN TAKALAR	AGUSSALIM, S.H. / 197108142006041002 / Penata (III/c)	Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar	Juru Sita Pengadilan Negeri Takalar	TMT Mulai : 14 Nove mber 2022
16	PN JENEPONTO	ANDI BURHAN, S.H.I/ 197306231993031004 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Malili	
		FATHU RIZQI FAUZI, S.H. / 198608102009122003 / Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Takalar	0
		IRFAN FAKHRUDDIN SYAM, S.H., M.Kn. / 198711212012121001 / Penata (III/c)	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng	0

17	PN BANTAENG	I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. (IV/a) / 197702012002121004	Ketua PN Bantaeng	Wakil Ketua PN Singaraja Kls Ib	1769 /DJU /SK/ KP.0 4.5/9 /202 1
		JUNAEDI, S.Hi. (III/c) / 197003301993031001	Panitera Muda Perdata PN Bantaeng	Panitera Muda PN Bulukumba Kls Ib	2443 /DJU /SK/ KP0 4.5/1 0/20 22
		NURHIKMAH, S.H. (III/c) / 197810112009122001	Panitera Pengganti Pn Bantaeng	Panitera Muda Hukum PN Jeneponto	2443 /DJU /SK/ KP0 4.5/1 0/20 23
		ABDUL BASYIR, S.H., M.H. (IV/a) / 197208132005021001	Hakim PN Bulukumba Kls Ib	Wakil Ketua PN Bantaeng Kls II	27/K MA/ SK/II/ 2022
		IRFAN FAKHRUDDIN SYAM, S.H., M.Kn. (III/c) / 198711212012121001	Panitera Pengganti PN Jeneponto Kls II	Panitera Muda Hukum PN Bantaeng Kls II	2443 /DJU /SK/ KP0 4.5/1 0/20 23
18	PN SINJAI	-	HAKIM PN DEPOK	WAKIL KETUA PN WATANSOPPEN G	1 Juli 2022
		MUH BASRI / 197207081993031001 / PENATA MUDA TK.I (III/B)	WAKIL KETUA PN BELOPA	KETUA PN Watansoppeng	8 Mare t 2022
		SYARIFUDDIN / 197105152006041037 / PENATA MUDA (III/A)	PANITERA MUDA PIDANA PN Watansoppeng	PANITERA MUDA PIDANA PN SENGKANG	10 Mare t 2022
19	PN WATANSOPPE NG	DARMO WIBOWO MOHAMAD, S.H., M.H. / 197402012005021002 / Pembina (IV/a)	HAKIM PN DEPOK	WAKIL KETUA PN Watansoppeng	1 Juli 2022

		Dr. SILVIANY S., SH., MH., M.Kn. / 197701172001122002 / Pembina Tk. I	WAKIL KETUA PN BELOPA	KETUA PN Watansoppeng	8 Maret 2022
		EKA HERFIANI, SH./ 198208112009042006 / Penata (III/c)	panitera muda pidana PN Watansoppeng	PANITERA MUDA PIDANA PN SENGKANG	10 Maret 2022
		AHYADI JUSAEMAN, S.E., M.Si. / 199102022015031005 / Penata (III/c)	KASUBBAG PTIP PN Watansoppeng	KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA PT MAKASSAR	1 Maret 2022
20	PN SELAYAR	ADI ANTO, S.H./ 19791214 200805 1 001 / PENATA TK. I, III/d	PANITERA PENGGANTI PN MALILI	PANITERA MUDA HUKUM SELAYAR	
		NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. / 19790404 200502 1 002 / PEMBINA, IV/a	HAKIM PN JEMBER	WAKIL KETUA PN SELAYAR	
		SITTI MARWAH / 19690630 199303 2 004 / PENATA, III/c	PANITERA PENGGANTI	PANMUD PERDATA PN SELAYAR	
21	PN MALILI	Usman, S.H./ 19680419 199303 1 003	Panitera Muda Pidana	Panitera PN Masamba	
		Adi Anto, S.H./ 19791214 200805 1 001	Panitera Pengganti	Panitera Muda Hukum PN Selayar	
		Fembi Rekrisna Grandea Putra, S.Kom.	Staff Pelaksana	Fungsional Pranata Komputer	
		Surya Trisna Abadi, A.Md.	Staff Pelaksana	Fungsional Arsiparis Terampil	
22	PN MASAMBA	Muhammad Syawaludin, S.H./197909112003121001/ Pembina(IV/a)	Wakil Ketua PN Masamba	Ketua PN Biak	
		Andi Musyafir, S.H./198009012005021001/ Pembina(IV/a)	Wakil Ketua PN Masamba	Ketua PN Masamba	
		Jawaruddin, S.H./ 196308041991031001 / Penata Tk. I (III/d)	Panitera PN Masamba	Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
		Ahmad Amin, S.H./ 197101021993031002 / Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Pidana PN Masamba	Panitera PN Malili	

		Jumriati, S.H./198902232009122002/ Penata Muda (III/a)	Jurusita Pengganti	Panitera Pengganti PN Masamba	
		Bayu Abadi Bagaskara, A.Md./19940306202012100 4/Pengatur (II/c)	Staff Pelaksana	Fungsional Arsiparis Terampil	
23	PN ENREKANG	Ari Prabowo, S.H., M.H/19702012002121003	Wakil Ketua PN Enrekang	Ketua PN Enrekang	
24	PN BELOPA	Jihan Hasmin, S.E. /197906092001122006 / Penata Tk. I (III/d)	PP PN Belopa	PP PN Maros	
		Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn /197701172001122002 / Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua PN Belopa	Ketua PN Watansoppeng	
		Arrang Baturante, S.H./ 198408182014032001 / Penata (III/c)	PP PN Belopa	Panmud Hukum PN Belopa	
		Sudarmin, S.H. / 198602132014081001 / Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag KPOT PN Belopa	Kasubbag KPOT PN Sengkang	
		Ahmad Sahal, S.H. / 198807052019031009 / Penata Muda (III/a)	Analís Perkara Peradilan	PP PN Masamba	

- **Demosi Jabatan**

Yang dimaksud Demosi Jabatan adalah Mutasi dengan penurunan jabatan, baik dari luar Sulawesi Selatan maupun ke luar Sulawesi Selatan atau dari dan ke Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan sendiri.

----*Nihil*----

PENSIUN

Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun

Tabel III.5. Pensiun Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	NAMA / NIP	JABATAN	TMT	KET
		PANGKAT			
1	PT MAKASSAR	Drs.Sugiarto/ 196205021989031005	Sekretaris	02 Mei 2022	Pensiun
		Daniel Palittin, S.H., M.H. / 195512311985031022	Hakim Tinggi	31 Des 2022	Pensiun
		Ketut Manika, S.H., M.H./ 195502211985031001	Hakim Tinggi	21 Feb 2022	Pensiun
		Hanida, S.E	Pustawakan		Pensiun
		Corry Sahusilawane, S.H., M.H. /195505221977032001	Hakim Tinggi	02 Mei 2022	Pensiun
		Timang, S.H./196012181995102001	Panitera Pengganti	31 DES 2022	Pensiun
		HJ. Sutarni, S.H./ 196404211985032004	Panitera Pengganti	31 DES 2022	Pensiun
		HJ. Baji, S.H./ 196012311983112001	Panitera Pengganti	31 DES 2022	Pensiun
		M Ramli M, S.lp., S.H./196012011984031004	Panitera Pengganti	31 DES 2022	Pensiun
2	PN MAKASSAR	Andayani, SH. / 196208141982032001	Panitera Pengganti	14 Agustus 2022	Pensiun
3	PN SUNGUMINASA	ABUBAKAR, SH.	Kasubag Umum & Keuangan	1 Januari 2022	Pensiun
		MUSTAFA RIJALI, S.H	Kasubag Kepegawaian Ortala	1 Agustus 2022	Pensiun
4	PN WATAMPONE	SIDIK, S.H. / 19640405 199303 1001/ Pembina (IV/a)	Kasubag Umum & Keuangan	1 Mei 2022	Pensiun
		2. BUSTAN JAYA, S.H. / 19620403 198303 1003/Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	1 Mei 2022	Pensiun
5	PN MAROS	HARMINI/ 196208061982032003/ III/c	PANITERA PENGANTI	1-Sep-22	Pensiun
6	PN MAKALE	Yohanis Peda Panoto, S.H.,M.H./ 196202031989031003/IVA	Panitera	1 Maret 2022	Pensiun

		Roland Parsada Samosir, S.H./198210022007041001/ Penata TK.I /IIId	Hakim	5-Apr-22	Pensiun Meninggal
7	PN PALOPO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	PN SENGKANG	Nurbaya/ 19631231 198703 2002/ Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1 Januari 2022	Pensiun Normal
9	PN BULUKUMBA	Syahiruddin/ 196412311989031050/ Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Persuratan	1 Januari 2023	Pensiun Normal
		Abd. Halik, S.H/ 196212311985031057/ Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	1 Januari 2023	Pensiun Normal
10	PN PANGKAJENE	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	PN BARRU	ANWAR, SH /	Panitera Muda Perdata	1 Juni 2022	Pensiun Normal
12	PN PAREPARE	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
13	PN SIDENRENG RAPPANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
14	PN PINRANG	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
15	PN TAKALAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
16	PN JENEPONTO	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
17	PN BANTAENG	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
18	PN SINJAI	AMIR N, S.H / 196212311984111003 / PENATA TK.I (III/D)	PANMUD PIDANA	31 DES 2022	Pensiun
19	PN WATANSOPPENG	I SAKKA, S.H. / NIP.196210171986032001 / Penata TK. I (III/d)	PANITERA MUDA PERDATA	1-Nov-22	
		JAMIRUDDIN, S.H. / NIP. 196412311987031017 / Penata TK. I (III/d)	SEKRETARIS	01 Januari 2022	
		SUHERMAN, S.Sos. / NIP. 196212311990031044 / Penata TK. I (III/d)	PANITERA PENGANTI	01 Januari 2022	
20	PN SELAYAR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	PN MALILI	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
22	PN MASAMBA	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
23	PN ENREKANG	Tasmiaty/ 196212311984032019 / IIIc	PP	1/4/2012	
		Muhammad Salim/ 196412311988031021 / IIId	Juru Sita	1/4/2008	
24	PN BELOPA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- **Pemberhentian dengan hormat tanpa hak pension/Pemberhentian Sementara dari Jabatan Organik**
NIHIL
- **Pemberhentian tidak dengan hormat**
Nihil

DIKLAT

Berikut ini data tenaga teknis yang pernah mengikuti Diklat sebagaimana dalam Tabel III.14 di bawah ini

Tabel III.6.
Tenaga Tehnis Yang Pernah Mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme Dan Pendidikan Formal Hukum (S1, S2 Dan S3)

NO	SATUAN KERJA	HAKIM			KEPANITERAAN / PP			KEJURUSITAAN		
		JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL	JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL	JUMLAH	DIKLAT PROF	DIKLAT FORMAL
1	PT MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PN MAKASSAR	12	12	0	6	6	0	0	0	0
3	PN SUNGGUMINASA	11	11	0	9	9	0	1	1	0
4	PN WATAMPONE	7	7	0	5	5	0	3	3	0
5	PN MAROS	8	7	1	3	3	0	0	0	0
6	PN MAKALE	3	3	0	5	5	0	0	0	0
7	PN PALOPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PN SENGKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PN BULUKUMBA	6	4	2	3	2	1	0	0	0
10	PN PANGKAJENE	4	2	2	4	2	2	0	0	0
11	PN BARRU	9	3	6	1	0	1	0	0	0
12	PN PAREPARE	21	10	11	9	8	1	1	1	0
13	PN SIDENRENG RAPPANG	0	0	0	2	0	2	1	0	1
14	PN PINRANG	3	3	0	0	0	0	0	0	0
15	PN TAKALAR	5	0	5	2	0	2	0	0	0
16	PN JENEPONTO	7	0	7	0	0	0	0	0	0
17	PN BANTAENG	7	0	7	3	0	3	0	0	0
18	PN SINJAI	3	0	3	1	0	1	0	0	0
19	PN WATANSOPPENG	2	0	2	0	0	0	0	0	0
20	PN SELAYAR	1	0	1	0	0	0	0	0	0
21	PN MALILI	5	2	3	2	2	0	1	1	0
22	PN MASAMBA	3	0	3	0	0	0	1	1	0
23	PN ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	PN BELOPA	2	2	-	3	2	1	0	0	0

Dari Tabel III.7 di atas, maka terlihatlah bahwa jumlah tenaga Teknis sebagian besar telah mengikuti pendidikan formal (S1, S2 dan S3) dan yang telah mengikuti Diklat peningkatan profesionalisme selama kurun waktu 2022, yaitu dengan rincian prosentase sebagai berikut:

Tabel III.7. Prosentase Tenaga Teknis yang telah mengikuti Diklat Peningkatan Profesionalisme

N O	JABATAN	JUMLAH	DIKLAT FORMAL		DIKLAT PROFESIONALISME	
			JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE
1	Hakim Tinggi / Hakim	143	81	56%	62	43%
2	Fungsional Kepaniteraan	61	45	73%	16	26%
3	Fungsional Kejurusitaan	8	7	87%	9	12%

Pengangkatan CAKIM / CPNS Baru Tahun 2022

Selama 2022 tidak terdapat penambahan calon hakim Peradilan Umum di Sulawesi Selatan, sedangkan penambahan CPNS wilayah Sulawesi Selatan sejumlah 53 (lima puluh tiga) orang.

Dari data tentang PNS yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia (baik Teknis maupun Non Teknis) diketahui bahwa jumlah aparatur Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum se Sulawesi Selatan telah **keluar/berhenti/meninggal sebanyak 8 orang, Pensiun sebanyak 20 orang, Jabatan yang kosong ada 291 orang**, sedangkan yang masuk sebagai CPNS adalah sebanyak 53 orang.

Dengan demikian, perbandingan antara Hakim/PNS yang berhenti ditambah jabatan yang kosong dengan Hakim/Cakim/CPNS baru adalah: $(291+20+8): 319$. Jadi, di lingkungan peradilan umum se Sulawesi Selatan ada kekurangan pegawai sebanyak 266 pegawai (53 orang – 319 orang).

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Tahun 2022 merupakan tahun ketujuh implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor: 117/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrual ini tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara wajar. Dengan demikian pengelolaan uang negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Untuk Anggaran Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Makassar selaku Satuan Kerja mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA-005.01.2.099418/2021 tanggal 23 November 2020 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.30.344.224.000,- (*Tiga puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*).
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03) Nomor: SP DIPA-005.03.2.099419/2021 tanggal 23 November 2020 dengan PAGU Anggaran sebesar Rp.421.815.000,- (*Empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadlian Tinggi Makassar dan Peradilan Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2022 untuk DIPA 01 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. LRA DIPA 01 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSEN REALISASI
			B. PEGAWAI (Rp)	B. BARANG (Rp)	B. MODAL (Rp)	B. PEGAWAI (Rp)	B. BARANG (Rp)	B. MODAL (Rp)	
1	099418	PT MAKASSAR	31,614,455.000	7,077,916.000	555,500.000	31,584,183.858	7,064,977,504	555,200,000	99,89%
2	099422	PN MAKASSAR	22,042,832.000.00	4,624,461,000.00	12,199,498,000.00	21,977,646,139.00	4,449,448,415.00	12,129,638,859.00	99,20%
3	099439	PN SUNGUMINASA	8,040,346,000.00	1,556,070,000.00	328,000,000.00	8,012,585,806.00	1,535,386,459.00	324,859,700.00	99,48%
4	099464	PN TAKALAR	3,519,291,000.00	1,677,926,000.00	303,000,000.00	3,497,661,447.00	1,563,998,522.00	303,000,000.00	97,54%
5	099465	PN JENEPONTO	3,269,254,000.00	1,825,517,000.00	76,500,000.00	3,266,839,813.00	1,788,759,153.00	76,497,000.00	99,24%
6	099560	PN BANTAEENG	3,408,347,000.00	1,463,305,000.00	446,586,000.00	3,395,891,848.00	1,455,693,984.00	446,586,000.00	99,62%
7	099471	PN MAROS	5,390,842,000.00	2,033,320,000.00	195,000,000.00	5,368,588,494.00	2,006,148,346.00	194,669,000.00	99,35%
8	099443	PN PANGKAJENE	3,976,169,000.00	1,852,864,000.00	316,845,000.00	3,939,279,758.00	1,569,781,019.00	316,369,300.00	94,79%
9	099450	PN BARRU	2,869,489,000.00	1,409,770,000.00	424,000,000.00	2,853,369,175.00	1,341,764,301.00	423,992,510.00	98,21%
10	099492	PN PAREPARE	4,050,114,000.00	1,905,522,000.00	406,000,000.00	4,027,432,769.00	1,889,312,402.00	405,546,000.00	99,38%
11	099511	PN SIDRAP	3,212,154,000.00	1,536,103,000.00	72,550,000.00	3,210,933,075.00	1,527,580,581.00	72,515,000.00	99,80%
12	099528	PN PINRANG	3,059,647,000.00	1,487,188,000.00	50,500,000.00	3,059,640,189.00	1,484,124,145.00	50,072,000.00	99,92%
13	099507	PN ENREKANG	2,907,359,000.00	1,615,151,000.00	10,000,000.00	2,691,190,613.00	1,576,249,115.59	10,000,000.00	94,37%
14	099549	PN WATANSOPENG	2,480,283,000	37,000,000	1,768,638,000	2,473,016,080	37,000,000	1,746,967,925.00	99,36%
15	099581	PN BULUKUMBA	3,824,498,000.00	1,704,058,000.00	111,000,000.00	3,792,170,498.00	1,623,902,787.00	111,000,000.00	98,01%
16	099595	PN SELAYAR	2,958,473,000.00	1,398,079,000.00	273,500,000.00	2,956,297,464.00	1,390,096,036.00	269,580,000.00	99,70%
17	099574	PN SINJAI	3,239,257,000.00	1,505,149,000.00	37,000,000.00	3,234,430,736.00	1,469,553,183.00	37,000,000.00	99,15%
18	099532	PN WATAMPONE	6,663,886,000.00	1,817,636,000.00	482,450,000.00	6,536,761,172.00	1,734,759,898.00	482,430,000.00	98,32%
19	099553	PN SENGGANG	4,290,891,000.00	1,670,245,000.00	514,500,000.00	4,035,396,363.00	1,666,931,348.00	514,196,003.00	96%
20	099600	PN PALOPO	3,750,286,000.00	1,540,554,000.00	37,000,000.00	3,684,274,526.00	1,517,498,982.00	37,000,000.00	98,33%
21	099617	PN MAKALE	4,113,558,000.00	1,430,676,000.00	594,500,000.00	4,070,356,795.00	1,195,613,093.00	594,027,000.00	95,46%
22	673013	PN MALILI	1,919,260,000.00	1,587,871,000.00	113,600,000.00	1,901,377,180.00	1,525,055,856.00	112,180,500.00	97,73%
23	672927	PN MASAMBA	2,152,337,000.00	1,447,582,000.00	60,000,000.00	2,143,179,073.00	1,409,602,266.00	59,999,976.00	98,71%
24	401928	PN BELOPA	2,421,599,000.00	1,458,402,000.00	1,986,065,000.00	2,380,329,828.00	1,440,472,906.00	1,966,418,784.00	98,65%

Adapun capaian pengelolaan anggaran Pengadilan Tinggi Makassar dan Peradilan Umum yang berada dibawahnya pada Tahun 2022 untuk DIPA 03 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. LRA DIPA 03 PT Makassar dan PN Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	KODE	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	PERSEN
	SATKER		B. BARANG	B. BARANG	
			(Rp)	(Rp)	REALISASI
1	099419	PT MAKASSAR	458,350,000	450,658,116	98.32%
2	099423	PN MAKASSAR	483,005,000.00	415,296,144.00	85.98%
3	099440	PN SUNGGUMINASA	97,700,000	97,592,600.00	99.89%
4	099465	PN TAKALAR	107,712,000	98,392,620	91.35%
5	099486	PN JENEPONTO	87,420,000	86,865,200	99.37%
6	099561	PN BANTAENG	76,454,000	75,680,400	98.99%
7	099472	PN MAROS	137,220,000	134,911,640	98.32%
8	099444	PN PANGKAJENE	61,000,000.00	51,785,720.00	84.89%
9	099451	PN BARRU	58,540,000	55,566,280	94.92%
10	099493	PN PAREPARE	100,415,000	100,118,400	99.70%
11	099512	PN SIDRAP	77,636,000	77,339,857	99.62 %
12	099529	PN PINRANG	105,700,000	105,665,249	99.97%
13	099508	PN ENREKANG	97,680,000	75,501,650	77.29%
14	099550	PN WATANSOPPENG	78,512,000	76,866,000	97.90%
15	099582	PN BULUKUMBA	103,050,000	97,782,850	94.89%
16	099596	PN SELAYAR	171,888,000	158,346,217	92.12%
17	099575	PN SINJAI	129654000	127959275	98.69%
18	099533	PN WATAMPONE	121,384,000	113,116,875	93.19%
19	099554	PN SENKANG	90,288,000	88,292,000	97.79%
20	099601	PN PALOPO	141,640,000	141,222,900	99.71%
21	099618	PN MAKALE	77,455,000	71,920,500	92.85%
22	673014	PN MALILI	82,436,000	79,464,190	96.40%
23	672928	PN MASAMBA	84,304,000	83,501,500	99.05%
24	402034	PN BELOPA	78,720,000	72,404,800	91.98%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Aset BMN pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se- Sulawesi Selatan merupakan Barang Milik Negara yang dipergunakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari BMN tersebut diantaranya tanah dan bangunan gedung kantor, tanah dan bangunan rumah negara, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventarisasi lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang berada pada 24 Satker.

Pengelolaan sarana dan prasarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung berupa barang milik negara yang ada pada Peradilan Umum di Sulawesi Selatan pada masing- masing

Satker Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung R.I. dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan umum se-Sulawesi Selatan wilayah Pengadilan Tinggi Makassar berupa sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana penunjang Tugas dan Fungsi Peradilan untuk keadaan Tahun 2022 dapat kami laporkan sebagai berikut

Tabel IV.3. Sarana/Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	SATKER	RUANG HAKIM	RUANG KEPANITERAAN	RUANG KESEKRETARIATAN
1	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	26	7	6
2	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	7	14	5
3	PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA	2	8	5
4	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	4	3	2
5	PENGADILAN NEGERI BARRU	3	5	4
6	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	1	5	5
7	PENGADILAN NEGERI MAROS	3	7	4
8	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	1	6	4
9	PENGADILAN NEGERI PAREPARE	3	7	7
10	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	4	5	5
11	PENGADILAN NEGERI SIDRAP	2	7	4
12	PENGADILAN NEGERI PINRANG	4	5	4
13	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	6	7	6
14	PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG	3	3	3
15	PENGADILAN NEGERI SENKANG	2	6	5
16	PENGADILAN NEGERI BANTAENG	3	4	4
17	PENGADILAN NEGERI SINJAI	3	5	4
18	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	1	6	4
19	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	3	3	3
20	PENGADILAN NEGERI PALOPO	1	5	4
21	PENGADILAN NEGERI MAKALE	3	6	4
22	PENGADILAN NEGERI BELOPA	4	7	4
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	1	4	4
24	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	1	4	4

➤ **RUMAH DINAS**

Data Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel IV.4. Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan
Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	ALAMAT	LUAS (M2)	KONDISI
1	PT MAKASSAR	BOTOLEMPANGAN	580	Baik
		JL. BUNGAYA	470	Baik
		ANDI TONRO	300	Baik
		PENGAYOMAN F9/2	225	Baik
		RACING CENTER IV/1	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/2	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/3	200	Rusak Berat
		RACING CENTER IV/4	200	Rusak Berat
		PENGAYOMAN F9/3	225	baik
		TODDOPULI RAYA NO.38	120	baik
		TODDOPULI RAYA NO.40	120	baik
		TODDOPULI RAYA NO: 44	120	baik
		TODDOPULI RAYA NO:42	120	baik
2	PN MAKASSAR	Jl. Urip Sumohardjo	167	Baik
		Jl. P. Kemerdekaan Km.9 BTN. HAMzy N.1/1	77	Rusak Ringan
		Jl. P. Kemerdekaan Km. 9 BTN. Hamzy N1/10	100	Rusak Ringan
		Jl. Veteran No. 398	70	Rusak Berat
		Jl. Manuruki II No. 55	90	Baik
		Jl. Manuruki II No. 53	73	Rusak Berat
		Jl. Manuruki II No. 53 A	89	Rusak Berat
		Jl. Manuruki II No. 53 B	73	Rusak Berat
		Jl. Rutan 5 B	100	Rusak Ringan
		Jl. Rutan No. 5 A	100	Baik
		Jl. Rutan No. 5 C	100	Baik
		Jl. Rutan 5 D	100	Baik
		Jl. Rutan 5 E	100	Baik
		Jl. Pengayoman F9/3	107	Baik
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6C	76	Rusak Berat
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6D	76	Rusak Berat
		Jl. Pelita Raya Tengah I Blok A3/6F	76	Rusak Berat
		Jl. Pengayoman F11/5	74	Baik
		Jl. Pengayoman F 11/6	74	Baik
		Jl. Gatot Subroto Lr. I No. 3A, Mks	156	Rusak Berat

3	PN SUNGGUMINASA	ANDI TONRO	70	Baik
		ANDI TONRO	70	Baik
		ANDI TONRO	70	Baik
		HOS COKROAMINOTO	325	Baik
		ABD. RASYID DG. LURANG	81	Baik
		ABD. RASYID DG. LURANG	81	Rusak Berat
		KENANGA	70	Baik
		MESJID RAYA	70	Baik
		MESJID RAYA	70	Baik
		Dr. Wahidin Sudirohusodo	80	Baik
		Dr. Wahidin Sudirohusodo	80	Baik
		Dr. Wahidin Sudirohusodo	80	Baik
4	PN PANGKAJENE	Jl. Flamboyan No. 42	130	Baik
		Jl. Flamboyan No. 41	70	Baik
		Jl. Flamboyan No. 43	70	Baik
		Jl. Flamboyan No. 39	70	Baik
		Jl. Andi Mauraga No. 74	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 76	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 78	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 80	70	Rusak Berat
		Jl. Andi Mauraga No. 82	70	Rusak Berat
5	PN BARRU	JL. COKROAMINOTO NO. 37	88	baik
		JL. A. M. AKBAR NO. 33	91	baik
		JL. H. LANAKKA NO. 4	43	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 32	83	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 34	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 36	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 38	83	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 44	80	baik
		JL. MASJID RAYA NO. 46	80	baik
6	PN TAKALAR	Sultan Hasanuddin No. 172	77	Baik
		Sultan Hasanuddin No. 176	77	Rusak Ringan
		Sultan Hasanuddin No. 170	77	Baik
		Sultan Hasanuddin No.2	80	Baik
		Sultan Hasanuddin No.3	80	Baik
		Sultan Hasanuddin No.5	84	Baik
		Kartini No. 2/138	165	Baik
		Kartini no. 140	80	Baik
		Sultan hasanuddin No. 174	77	Baik
		Fitrah	700	Rusak Berat
7	PN MAROS	Jl. Abbas Dg. Sialu	179	Baik
		Jl. Beringin	116	Baik
		Jl. Ratulangi	81	Baik
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan

		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Ratulangi	78	Rusak Ringan
		Jl. Taqwa	73	Baik
		Jl. Taqwa	72	Baik
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	343	Rusak Ringan
		Jl. Beringin	70	Rusak Berat
8	PN JENEPONTO	LANTO DAENG PASEWANG	81	BAIK
		LANTO DAENG PASEWANG	130	BAIK
		PAHLAWAN	72	Rusak Ringan
		PAHLAWAN	72	Rusak Ringan
		PAHLAWAN	72	Rusak Ringan
		PAHLAWAN	72	Rusak Ringan
		PAHLAWAN	74	Rusak Ringan
		KAMBOJA	77	Rusak Ringan
9	PN PAREPARE	JL. ABUBAKAR LAMBOGO	177	Rusak Berat
		JL. VETERAN 31	268	BAIK
		PERSADA INDAH NO. 7	72	BAIK
		BERINGIN NO. 13	75	BAIK
		JL. BERINGIN NO. 15	75	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 53	91	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41 A	80	BAIK
		JL. PERSADA INDAH NO. 05	72	BAIK
		JL. JEND. SUDIRMAN NO. 41	135	BAIK
		JL. PERSADA INDAH NO. 03	72	BAIK
		VETERAN NO. 30 A	87	Rusak Berat
10	PN ENREKANG	Jl. SILIWANGI	70	
		Jl. SILIWANGI	70	
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	
		JL. PATTIMURA	70	
		JL. JENDERAL SUDIRMAN	70	
		JL. LASINRANG NO. 2	70	
11	PN SIDRAP	Jl. Abd. Gani Rasul	70	Rusak Ringan
		Jl. Andi Makkasau	126	Rusak Ringan
		Lanto Dg Pasewang Lr	83	Rusak Ringan
		Jl. Andi Makkasau	70	Rusak Ringan
		Lt. Dg Pasewang Lr	86	Rusak Ringan
		Lanto Dg Pasewang	109	Rusak Ringan
		Abd Gani Rasul	82	Rusak Ringan
		Lanto Dg Pasewang	70	Rusak Ringan
		Lanto Dg Pasewang	70	Rusak Ringan

12	PN PINRANG	GATOT SUBROTO NO. 18	72	Rusak Ringan
		GATOT SUBROTO NO. 20	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 22	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 24	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 12	72	Rusak Berat
		GATOT SUBROTO NO. 10	75	Rusak Berat
		MT. HARYONO NO. 2	83	Rusak Ringan
		JEND. SUKAWATI NO. 38A	100	Rusak Ringan
		JENDERAL SUKAWATI NO. 38B	73	Rusak Ringan
		GATOT SUBROTO NO. 14	72	Rusak Berat
13	PN WATAMPONE	JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	70	Baik
		JL. M.H TAMRIN	83	Baik
		JL. HOS COKROAMINOTO	83	Rusak Berat
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	95	Baik
		Jl. Yos Sudarso	83	Baik
		Jl. Lanto Dg. Pasewang	207	Rusak Berat
14	PN WATANSOPPENG	JL. ABDUL MUIS	82	Baik
		Jl. H.A. WANA	72	Baik
		Jl. SAMUDERA	106	Baik
		Jl. BALUBU	95	Baik
		Jl. BALUBU	95	Baik
		Jl. MERDEKA	70	Baik
		Jl. MERDEKA	70	Baik
		Jl. MERDEKA	70	Baik
		Jl. MERDEKA	70	Baik
15	PN SENGKANG	VETERAN NO. 46 SENGKANG	95	Rusak Berat
		JL. BAU BAHARUDDIN	70	Baik
		JL. BAU MAHMUD	70	Baik
		PENGADILAN	70	Baik
		PENGADILAN	70	Baik
		PENGADILAN	70	Baik
		PENGADILAN	70	Baik
		A MACCA NO.89	80	Baik
		A.MACCA AMIRULLAH	80	Baik
16	PN BANTAENG	Jln. Sungai Bialo No. B22	72	Baik
		Jln. Sungai Bialo No. B5/22	72	Baik
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B2	72	Baik
		JLN. SUNGAI BIALO NO. B 24	72	Baik
		JLN. SUNGAI BIALO NO. 18	72	Baik
		JLN. SUNGAI BIALO B 20	72	Baik

		JLN. TERATAI LORONG NO. 17	72	Baik
		JLN. KENANGA	72	Baik
		JLN. KENANGA	74	Baik
17	PN SINJAI	Mading Mathan 7	70	
		Abu Bakar AT. no. 8	70	
		Mading Mathan No. 9	70	Baik
		Tassililu, Sinjai Barat	70	Baik
		Jend. Sukowati	90	Baik
		Mading mathan No. 5	70	Baik
		Abu Bakar AT No. 6	70	Rusak Ringan
		KI HAJAR DEWANTARA	80	Baik
		PERSATUAN RAYA	226	Baik
		PERSATUAN RAYA	80	Baik
		PERSATUAN RAYA	50	Rusak Berat
18	PN BULUKUMBA	JALAN KENARI NO.11	72	Rusak Ringan
		Jalan Matahari No.3	108	Rusak Ringan
		JALAN. MATAHARI NO.5	84	Rusak Ringan
		JALAN .S. MAJIDI NO.26	83	Baik
		JALAN MATAHARI NO.1	72	Rusak Ringan
		JALAN .Anggrek NO. 21	233	Rusak Ringan
		JALAN . MELATI NO.9	72	Rusak Ringan
		JALAN ANGGREK NO.19	308	Rusak Ringan
		JALAN CENDANA No. 2 A	72	Rusak Ringan
		JALAN . CENDANA . NO 2B	72	Rusak Ringan
		JALAN .CENDANA NO.2C	72	Rusak Ringan
19	PN SELAYAR	Siswomiharjo No.47 Benteng	113	Baik
		Siswomiharjo No.23A	73	baik
		Siswomiharjo No.23A	73	baik
		Siswomiharjo No.25	73	baik
		Siswomiharjo No.27	73	baik
		Siswomiharjo No.29	73	baik
		Siswomiharjo No.45	72	baik
		Siswomiharjo No.47	72	baik
		DR. MUhtar No.2	104	baik
20	PN Palopo	Andi Djemma No. 139	120	Rusak Berat
		Tandipau No. 53	120	Rusak Ringan
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Baik
		K.H. Ahmad Razak	112	Rusak Berat
		Tandipau No. 2	110	Baik
		Tandipau No. 6	90	Baik
21	PN MAKALE	Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	Rusak Ringan
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK
		Jln.Pongtiku no.112 Makale	70	BAIK

		Jln.Pongtiku Makale	70	Rusak Ringan
		Jln.Manggasa Makale	70	Rusak Ringan
22	PN BELOPA	NIHIL	NIHIL	belum memiliki rumah dinas
23	PN MASAMBA	NIHIL	NIHIL	belum memiliki rumah dinas
24	PN MALILI	Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur	NIHIL	Baik

➤ KENDARAAN DINAS

Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel IV.5 Data Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan Tahun 2022

- Roda 4

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	PT MAKASSAR	TOYOTA ALPHARD	Baik	KETUA	OPERASIONAL
		TOYOTA CAMRY	Baik	KETUA	OPERASIONAL
		TOYOTA FORTUNER	Baik	WAKIL KETUA	OPERASIONAL
		TOYOTA CAMRY	Baik	WAKIL KETUA	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	KASUB TURT	OPERASIONAL
		TOYOTA HIACE	Baik	KASUB TURT	OPERASIONAL
		TOYOTA ALTIS	Baik	PANITERA	OPERASIONAL
		TOYOTA VIOS	Baik	SEKRETARIS	OPERASIONAL
2	PN MAKASSAR	TOYOTA ALTIS	Baik	Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA VIOS	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA KF80	Rusak Ringan	Kabag Umum	OPERASIONAL
		TOYOTA KF83	Rusak Ringan	Kasubag	OPERASIONAL
		TOYOTA KF70	Rusak Berat	Kasubag	-
3	PN SUNGGUMINASA	TOYOTA KF70	Rusak Berat	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	OPERASIONAL
4	PN PANGKAJENE	TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
5	PN BARRU	TOYOTA KIJANG LX	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Ketua	

		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	
		TOYOTA RUSH	Baik	Sekretaris	
6	PN TAKALAR	TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA RUSH	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	Pinjam Pakai PEMDA
7	PN MAROS	TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA RUSH	Baik	Wakil Ketua	PINJAM PAKAI
8	PN JENEPONTO	TOYOTA KIJANG SUPER LSX	Rusak Ringan	Sekretaris	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
9	PN PAREPARE	TOYOTA RUSH	Baik	Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA KV83	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	KPB	OPERASIONAL
10	PN ENREKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
11	PN SIDRAP	MITSUBISHI PAJERO	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
12	PN PINRANG	TOYOTA INNOVA	Baik	Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
13	PN WATAMPONE	FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG	Rusak Berat	Kasub PTIP	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Baik	Kasub Keuangan	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
14	PN WATANSOPPENG	TOYOTA HILUX	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Wakil Ketua	Operasional
		TOYOTA KIJANG STANDAR	Baik	Panitera	Pinjam Pakai

		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Sekretaris	Operasional
		TOYOTA INNOVA	Baik	Kasub KP dan ortala	Operasional
15	PN SENGKANG	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	
		TOYOTA INNOVA	Baik	Wakil Ketua	
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	
		TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA	Baik	Sekretaris	Pinjam Pakai
16	PN BANTAENG	TOYOTA KIJANG SUPER	Rusak Ringan	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA	Rusak Ringan	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA	Rusak Ringan	Wakil Ketua	OPERASIONAL
17	PN SINJAI	TOYOTA INNOVA STD	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA NEW AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA KIJANG	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
18	PN BULUKUMBA	TOYOTA INNOVA G	Rusak Ringan	Ketua	OPERASIONAL
		TOYOTA KIJANG	Rusak Ringan	OPERASIONAL	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA	Rusak Ringan	Panitera	opERASIONAL
19	PN SELAYAR	TOYOTA KIJANG KF70	Rusak Ringan	PP	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Sekretaris	OPERASIONAL
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	OPERASIONAL
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Kasubbag	PINJAM PAKAI
		MITSUBISHI EXPANDER	Baik	Ketua	OPERASIONAL
20	PN PALOPO	TOYOTA KIJANG SUPER	Baik	Sekretaris	Operasional
		Toyota Kijang Innova	Baik	Ketua	Pinjam Pakai
		TOYOTA INNOVA E	Baik	Wakil Ketua	Operasional
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	Operasional
21	PN MAKALE	TOYOTA FORTUNER	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Wakil Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYOTA AVANZA E-DRES	Baik	Sekretaris	operasional
		TOYOTA AVANZA VELOZ	Baik	Panitera	Operasional
		TOYOTA INNOVA/E	Baik	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	operaional

22	PN BELOPA	INNOVA	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
		TOYORA RUSH	Baik	Ketua	
		EXPANDER	Baik	Panitera	sewa dari MA
		EXPANDER	Baik	Sekretaris	
23	PENGADILAN NEGERI MALILI	TOYOTA INNOVA/E	Baik	Sekretaris	
		TOYOTA AVANZAVELOZ	Baik	Panitera	
		TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	PINJAM PAKAI
24	PN MASAMBA	TOYOTA INNOVA/G	Baik	Ketua	
		TOYOTA AVANZA	Baik	Panitera	
		DAIHATSU TERIOS	Baik	Sekretaris	PINJAM PAKAI

- RODA 2

NO	SATKER	TIPE	KONDISI	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	PT MAKASSAR	HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUB KEPEG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	OPERASIONAL
2	PN MAKASSAR	SUZUKI THUNDER 125	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	-
		SUZUKI NEW SHOGUN	BAIK	JURUSITA	OPERASIONAL
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA GLP.III	RUSAK BERAT	STAF	-
3	PN SUNGGUMINASA	HONDA CG110	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Dalam Proses Pendaftaran lelang
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Dalam Proses Pendaftaran lelang
		HONDA MCB	RUSAK BERAT	SEKRETARIS	Dalam Proses Pendaftaran lelang
		YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Dalam Proses Pendaftaran lelang
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Operasional
		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	PANMUD	Dalam Proses Pendaftaran lelang

		YAMAHA 256	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	Operasional
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	STAF	Dalam Proses Pendaftaran lelang
4	PN PANGKAJENE	SUZUKI THUNDER	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA X125	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
5	PN BARRU	HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA ASTREA	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
6	PN TAKALAR	SUZUKI FL125	BAIK	BENDAHARA PENGELUARAN	
		HONDA NF 125	BAIK	KASUBBAG UMUM & KEU	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	KASUBBAG PTIP	
		HONDA NF 12AIC	BAIK	KASUBBAG UMUM & KEU	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	JURUSITA	
		YAMAHA JUPITER Z	BAIK	JURUSITA	
		HONDA GLPRO	BAIK	PANITERA PENGGANTI	
		HONDA WIN100	RUSAK RINGAN	KASUBBAG UMUM & KEU	OPERASIONAL
7	PN MAROS	HONDA GL PRO	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		YAMAHA MX	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
8	PN JENEPONTO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GLPRO	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER MX	BAIK	BENDAHARA	
		SUZUKI AXELO	BAIK	JURUSITA	

		YAMAHA MX CW	BAIK	JURUSITA	
9	PN PAREPARE	HONDA MEGA PRO	RUSAK BERAT	KPB	OPERASIONAL
		HONDA MEGA PRO	BAIK	PANMUD PIDANA	OPERASIONAL
		HONDA NV125	BAIK	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	OPERASIONAL
		HONDA NV125	BAIK	SEKRETARIS	OPERASIONAL
		YAMAHA JUPITER CW	BAIK	PANMUD HUKUM	OPERASIONAL
10	PN ENREKANG	SUZUKI SHOGUN	BAIK	MUNIR	
		HONDA GL160	BAIK	EMIL SALIM	
		HONDA NF125	BAIK	RUSWIJAYA	
11	PN SIDRAP	HONDA CG110	RUSAK BERAT		sudah dilelang
		SUZUKI A1	RUSAK BERAT		sudah dilelang
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	KEPALA SUB BAGIAN	
		HONDA NF125	RUSAK RINGAN	PANMUD PIDANA	
		HONDA NC11B	BAIK	SEKRETARIS	
12	PN PINRANG	HONDA SUPRA	BAIK	JURUSITA	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	PANMUD HUKUM	OPERASIONAL
		SUZUKI THUNDER	BAIK	KETUA	OPERASIONAL
		SUZUKI A100	RUSAK BERAT	KPB	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	PANITERA PENGGANTI	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	SEKRETARIS	OPERASIONAL
13	PN WATAMPONE	HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA FIT	RUSAK RINGAN	JURUSITA PENGGANTI	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	JURUSITA	OPERASIONAL
		YAMAHA MIO SOUL	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA 125	BAIK	BENDAHARA PENGELUARAN	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA 125	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SPACY	BAIK	STAF	OPERASIONAL
14	PN WATANSOPPENG	SUZUKI UW125 SC	BAIK	STAF	OPERASIONAL

		HONDA NF11C1C M/T	BAIK	JURUSITA PENGGANTI	OPERASIONAL
		SUZUKI EN125 A	BAIK	PANITERA PENGGANTI	OPERASIONAL
		HONDA GL PRO	RUSAK RINGAN	JURUSITA PENGGANTI	SUDAH DILELANG
		HONDA CG 110	RUSAK BERAT	KPB	SUDAH DILELANG
15	PN SENGKANG	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA GL-PRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA MEGAPRO	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA GL160	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA CS124	BAIK	JURUSITA	OPERASIONAL
		HONDA NF11C1	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI GT125	RUSAK BERAT	KPB	
16	PN BANTAENG	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK BERAT	PANMUD	
		SUZUKI THUNDER	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
17	PN SINJAI	HONDA KHARISMA	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	BAIK	PANMUD	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL
18	PN BULUKUMBA	YAMAHA JUPITER MX	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL
		SUZUKI SHOGUN	RUSAK RINGAN	OPERASIONAL	OPERASIONAL
		SUZUKI AXELO	RUSAK RINGAN	OPERASIONAL	OPERASIONAL
		SUZUKI NEW ADDRESS	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
19	PN SELAYAR	HONDA A100	RUSAK RINGAN	KASUBBAG	OPERASIONAL
		HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA WIN	RUSAK RINGAN	STAF	OPERASIONAL

		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	STAF	OPERASIONAL
		HONDA SUPRA	BAIK	KASUBBAG	OPERASIONAL
20	PN PALOPO	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	
		HONDA NF125SF	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA NF125TR	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA SUPRA X 125	BAIK	PANMUD	Operasional
		HONDA SPACY CW	BAIK	KETUA	Operasional
		HONDA NEW BLADE CW	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA MEGAPRO CW	BAIK	PANMUD	Operasional
21	PN MAKALE	HONDA CG110	RUSAK BERAT	KPB	operasional
		HONDA GLMAX	RUSAK BERAT	KPB	operasional
		HONDA MEGAPRO	RUSAK RINGAN	STAF	operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	STAF	operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	operasional
		SUZUKI SHOGUN	BAIK	KASUBBAG	operasional
22	PN BELOPA	YAMAHA CW F1	BAIK	PANMUD	Operasional
		YAMAHA AEROX	BAIK	KASUBBAG	Operasional
		HONDA REVO X	BAIK	KASUBBAG	Operasional
23	PN MALILI	YAMAHA JUPITER CW135	BAIK	SEKRETARIS	Operasional
		YAMAHA JUPITER CW135	BAIK	STAF	Operasional
		HONDA BEAT	BAIK	STAF	Operasional
24	PN MASAMBA	HONDA SUPRA X125	BAIK	Kasubbag	Operasional
		HONDA VIERZA	BAIK	JS	Operasional
		HONDA SUPRA X125	BAIK	STAF	Operasional

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum.

Berdasarkan SK KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka disetiap pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut. Baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi informasi merupakan faktor penting pendukung kinerja instansi,

khususnya pada Pengadilan Tinggi Makassar. Saat ini fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar telah dioperasikan non-stop selama 24 jam setiap harinya. Sehingga pengisian data dan akses informasi dapat diakses setiap waktu oleh seluruh warga Pengadilan Tinggi Makassar di lingkungan kantor. Berikut akan diulas secara detail mengenai pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Makassar. Mayoritas hampir semua ketua pengadilan telah menetapkan Tim Teknologi Informasi dalam bentuk surat keputusan ketua pengadilan.

- Perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengadilan adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Perkara, ini merupakan aplikasi wajib yang harus dimiliki setiap pengadilan di Indonesia. Aplikasi ini digunakan sebagai aplikasi bantu register perkara dalam proses menuju pelaporan yang paperless. Selain itu aplikasi CTS versi web, bisa diakses oleh para pencari keadilan untuk mencari informasi perkara yang sedang berlangsung.

Sekarang ini sudah ada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara untuk tingkat pengadilan banding. Aplikasi ini menampung data banding yang dikirim oleh pengadilan tingkat pertama yang mengajukan banding dengan memasukkan data banding melalui aplikasi SIPP pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sama-sama sudah memiliki aplikasi SIPP sehingga dapat menjadi alat kontrol pengadilan tingkat banding kepada pengadilan tingkat pertama.

2. Aplikasi e-Court, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah;

3. Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi utama sebagai media pelaporan dan penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, keuangan, dan remunerasi.
4. Aplikasi SAKTI, Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi merupakan aplikasi keuangan untuk satker, yang menghasilkan sebuah laporan keuangan seperti laporan realisasi belanja, realisasi pendapatan dan realisasi-realisisasi lain yang berhubungan dengan keuangan. Aplikasi ini juga untuk pencatatan Aset, baik aset tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan irigasi maupun jaringan. dan juga dapat mencatat aset-aset tak berwujud seperti software computer serta untuk pencatatan transaksi barang-barang yang peruntukannya sebagai persediaan atau biasa disebut dengan barang habis pakai.
5. Aplikasi gaji (GPP) Aplikasi ini sebenarnya memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai aplikasi pencetakan dokumen perhitungan gaji pegawai PNS/Hakim/Polisi, dan juga sebagai aplikasi pendukung pada aplikasi SAKTI.
6. Aplikasi emonev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan data hasil pemantauan generasi ketiga dari aplikasi yang sudah dikembangkan dan dijalankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di terbitkan
7. Aplikasi emonev DJA atau disebut Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
8. Aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) merupakan aplikasi serbaguna pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, pemeliharaan dan penghapusannya.
9. Website, semua pengadilan sudah memiliki website pengadilan masing-masing, tujuan dari website ini adalah sebagai bentuk pelayanan informasi publik.
10. Sikep, Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
11. Komdanas, Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi

- **Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum**

Tahun 2022 untuk bidang kepaniteraan demi mendukung tujuan Mahkamah Agung RI menjadi peradilan berbasis teknologi diaplikasikan dengan peradilan berbasis elektronik melalui aplikasi E-Court. Dengan E-Court pendaftaran bisa melalui online web base atau fitur E-Filing, Perhitungan dan Pembayaran Eskum online atau fitur E-Payment, Pemanggilan Pihak secara online atau elektronik email dengan fitur E-summon, dan yang terakhir persidangan secara elektronik atau E-litigasi.

Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung e-Court berupa sosialisasi informasi e-Court kepada advokat maupun masyarakat pengguna e-Court seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan e-Court.

Pada Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan sosialisasi informasi e-Court karena dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Dasar hukum layanan e-Court adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, disampaikan sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, di seluruh Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar sudah menggunakan aplikasi e-Court.

Tabel IV.6. Implementasi e-court di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	DAFTAR ONLINE	BAYAR	SKUM	GUGATAN	PERMOHONAN	BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA	TOTAL
1	PN MAKASSAR	720	720	720	402	226	23	48	720
2	PN SUNGGUMINASA	269	269	269	89	174	-	6	269
3	PN WATAMPONE	83	83	83	46	26	0	11	83
4	PN MAROS	150	150	150	57	89	2	2	150
5	PN MAKALE	330	330	330	253	72	1	4	330
6	PN PALOPO	60	60	60	29	26	2	3	60
7	PN SENGGANG	118	118	118	48	58	3	9	118
8	PN BULUKUMBA	154	154	154	33	116	0	5	154
9	PN PANGKAJENE	46	56	56	32	19	0	5	56
10	PN BARRU	34	34	34	19	0	2	12	34
11	PN PAREPARE	114	114	114	35	78	0	1	114
12	PN SIDRAP	66	66	66	40	22	4	0	66
13	PN PINRANG	52	52	52	23	15	5	9	52
14	PN TAKALAR	45	45	45	38	5	0	2	45
15	PN JENEPONTO	35	35	35	28	4	1	2	35
16	PN BANTAENG	18	9	9	9	16	1	2	28
17	PN SINJAI	19	19	19	19	79	1	0	156
18	PN WATANSOPPENG	34	34	34	11	21	0	2	34
19	PN SELAYAR	100	100	100	10	88	0	2	100
20	PN MALILI	85	85	85	58	23	0	2	83
21	PN MASAMBA	45	45	0	33	11	0	1	45
22	PN ENREKANG	43	43	43	17	25	0	1	43
23	PN BELOPA	81	81	81	26	54	1	0	81

- **Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum**

Untuk implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dapat dilihat pada tabel di dibawah ini.

Tabel IV.7. Implementasi SIPP di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	SISA LALU	MASUK	PUTUS	SISA	RASIO PENANGANAN PERKARA
1	PN Makassar	866	3,170	3,262	774	80.82%
2	PN Sungguminasa	44	269	267	46	85.30%
3	PN Takalar	20	287	296	11	96%
4	PN Jeneponto	11	210	189	32	85.52%
5	PN Bantaeng	1	153	148	5	96%
6	PN Maros	41	2,079	2,083	25	98.25%
7	PN Pangkajene	51	403	409	45	91.29%
8	PN Barru	11	1,308	1,299	20	92.91%
9	PN Parepare	17	793	791	19	97.65%
10	PN Sidrap	22	349	328	43	88%
11	PN Pinrang	70	1,008	1,025	53	95.08%
12	PN Enrekang	26	113	117	22	84.17%
13	PN Watansoppeng	42	197	215	24	89.96%
14	PN Bulukumba	8	1,604	1,568	44	89.96%
15	PN Selayar	13	458	444	14	96.94%
16	PN Sinjai	23	124	125	22	99%
17	PN Watampone	33	292	296	29	91.08%
18	PN Sengkang	34	3,168	3,142	61	98.13%
19	PN Palopo	62	484	514	32	94.14%
20	PN Makale	84	532	527	89	85.55%
21	PN Malili	17	267	255	29	89.79%
22	PN Masamba	18	211	193	18	84.28%
23	PN Belopa	33	220	227	26	89.72%

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Makassar dan satker dibawahnya melakukan berbagai upaya demi mewujudkan visi Badan Peradilan Yang Agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Dirjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi:

1. Kepemimpinan (leadership);
2. Perencanaan Strategis (strategic planning);
3. Fokus Pelanggan (customer focus);
4. Sistem Dokumentasi (document system);
5. Manajemen Sumber Daya (resource management);
6. Manajemen Proses (process management); dan
7. Hasil Kinerja (performance results).

Seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar telah diakreditasi dan pada tahun 2022 telah diassessment, dengan nilai sebagai berikut :

Tabel V.1. Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar Yang Telah Terakreditasi

NO	NAMA SATKER	KELAS	LOKASI	AKREDITASI
1	PT MAKASSAR	Type A	Makassar	A
2	PN MAKASSAR	Kelas 1 A Khusus	Makassar	A
3	PN SUNGGUMINASA	Kelas 1 A	Sungguminasa	A
4	PN TAKALAR	Kelas II	Takalar	A
5	PN JENEPONTO	Kelas II	Jeneponto	A
6	PN BANTAENG	Kelas II	Bantaeng	A
7	PN MAROS	Kelas I B	Maros	A
8	PN PANGKAJENE	Kelas II	Pangkajene	A
9	PN BARRU	Kelas II	Barru	A
10	PN PAREPARE	Kelas II	Parepare	A
11	PN SIDRAP	Kelas II	Sidrap	A
12	PN PINRANG	Kelas II	Pinrang	A
13	PN ENREKANG	Kelas II	Enrekang	A
14	PN WATANSOPPENG	Kelas II	Watansoppeng	A
15	PN BULUKUMBA	Kelas I B	Bulukumba	A
16	PN SELAYAR	Kelas II	Selayar	A
17	PN SINJAI	Kelas II	Sinjai	A
18	PN WATAMPONE	Kelas 1 A	Watampone	A
19	PN SENGGANG	Kelas I B	Sengkang	A
20	PN PALOPO	Kelas I B	Palopo	B
21	PN MAKALE	Kelas I B	Makale	A
22	PN MALILI	Kelas II	Malili	A
23	PN MASAMBA	Kelas II	Masamba	A
24	PN BELOPA	Kelas II	Belopa	A

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar telah melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu melalui satu pintu, yang mana PTSP ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Prinsip dalam pelaksanaan PTSP yaitu:
 - a. Keterpaduan;
 - b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
 - c. Koordinasi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Pelayanan dan Meja Informasi, yang ada di bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK. Ketua Pengadilan masing-masing setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi dan juga petugas pelayanan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan petugas meja informasi yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat di meja mana akan mendapatkan layanan sesuai dengan yang dituju.

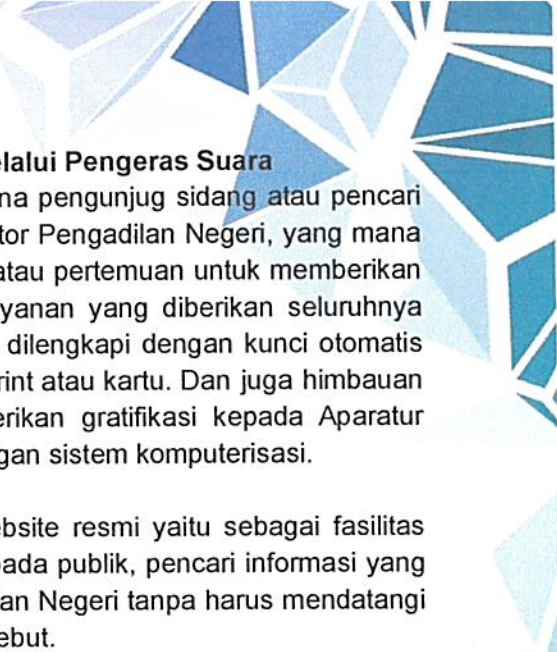
Pada perlombaan PTSP Tahun 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI, Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Parepare masuk dalam nominasi.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan dan menjaga kemadirian dalam pemberian layanan kepada pencari keadilan beberapa Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan telah menerapkan beberapa inovasi, diantaranya:

a. Penerapan Security Justice

Gedung Pengadilan Negeri telah menerapkan *security justice* dan *area steril* guna menindaklanjuti penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). *Security justice* yang dimaksud adalah jalur menuju masuk atau keluar dari ruang sidang tidak ada pertemuan antara pencari keadilan baik Jaksa, Pengacara, Terdakwa, Saksi maupun Penasehat Hukum dengan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti. Sehingga memberikan rasa keamanan Majelis Hakim atau Panitera Pengganti.

- 
- b. **Steril Area dan Himbauan Anti Gratifikasi Melalui Pengeras Suara**
Sedangkan untuk area steril adalah area dimana pengunjug sidang atau pencari keadilan tidak bisa masuk ke area internal kantor Pengadilan Negeri, yang mana dapat memungkinkan terjadinya pembicaraan atau pertemuan untuk memberikan intervensi terkait dengan suatu perkara. Pelayanan yang diberikan seluruhnya harus melalui Meja PTSP. Area steril tersebut dilengkapi dengan kunci otomatis atau kunci elektrik yang menggunakan finger print atau kartu. Dan juga himbauan kepada pencari keadilan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri melalui pengeras suara dengan sistem komputerisasi.
 - c. **Website Resmi Untuk Sarana Informasi**
Pengadilan Negeri juga telah mempunyai website resmi yaitu sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut.
 - d. **Ruang Tunggu Pelayanan**
Disediakan Ruang Tunggu dimana pencari keadilan dapat beristirahat sejenak sambil menunggu antrian untuk mendapatkan layanan.
 - e. **Anjungan Terpadu dan Pojok e-Court**
Disediakan pula Anjungan Terpadu berupa komputer yang dapat mengakses layanan E- Court, Eraterang, SIPP, Website Pengadilan Negeri dan Aplikasi SIWAS. Selain itu anjungan terpadu tersebut sudah terhubung dengan jaringan internet sehingga apabila pencari keadilan ingin mendapatkan informasi yang lain dapat juga menggunakannya. Disediakan pula Pojok E-Court untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara perdata secara online.
 - f. **Pembayaran Panjar Biaya Perkara di Tempat**
Disediakan pula *Payment Point* yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara perdata.
 - g. **Anjungan Survey**
Untuk mengetahui kualitas pelayanan pada masyarakat dan indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri, telah disediakan anjungan survey kepuasan masyarakat dan survey persepsi korupsi.
 - h. **Pelayanan Difabel**
Untuk memberikan layanan kepada penyandang difabel, di Pengadilan Negeri juga disediakan sarana dan prasarannya.

Tabel V.2. Daftar Inovasi pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	NAMA	URAIAN	MANFAAT	PENGUNA LAYANAN
1	Pengadilan Negeri Makassar	Aplikasi SMS Gateway	Aplikasi untuk Untuk memberikan pelayanan informasi berupa : • info perkara • info tilang • notifikasi ke pegawai / eksternal • pemberitahuan perpanjangan penahanan • penundaan sidang • notifikasi jadwal sidang kepada jaksa • panggilan sidang kepada para pihak	Pegawai dan Masyarakat
		Aplikasi PN Makassar Mobile	PN Makassar Mobile adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis Android. Sehingga memudahkan akses informasi Pengadilan Negeri Makassar kepada masyarakat terpenuhi dengan membuka aplikasi PN Makassar Mobile.	Masyarakat
		Layanan Informasi Online melalui Whatsapp	Layanan informasi online secara realtime melalui whatsapp yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Website Pengadilan Negeri Makassar. Whatsapp akan menjawab secara otomatis dengan mendeteksi kata kunci dari pertanyaan yang diajukan, seperti info perkara, jadwal sidang, informasi tilang, surat keterangan, e-Court, Panjar Biaya Perkara, dan lainnya.	Masyarakat

		Aplikasi Madeceng	Aplikasi e-Tracking Madeceng (Manajemen Data Persuratan Pengadilan) sebagai bentuk layanan Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan informasi yang cepat dan transparan dalam melakukan pencarian elektronik/penelusuran status tata kelola persuratan, sebagai wujud Visi Misi Pengadilan Negeri Makassar. terhadap keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.	Masyarakat
		Aplikasi Simonas	Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Simonas) pada Pengadilan Negeri Makassar, bermanfaat dalam rangka penyajian data monitoring menjadi lebih cepat, tepat, akurat dan responsif, kemudian Penyajian data monitoring lebih akurat, jika terjadi perbedaan dilapangan bisa ditangani dengan segera, Proses Evaluasi dapat dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan secara Periodik, setiap bulan, triwulan, semester dan Tahunan.	Pegawai dan Masyarakat
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	Info Tilang	Aplikasi pencarian perkara tilang pada Pengadilan Negeri Sungguminasa	Masyarakat
		Mobile Apps	Aplikasi berbasis web dengan mobile view untuk pencarian informasi perkara pada Pengadilan Negeri Sungguminasa	Masyarakat
3	Pengadilan Negeri Maros	SP5	Aplikasi ini digunakan untuk pengajuan izin pengeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pinjam	Pengadilan, Kejaksaan, Polisi, Masyarakat

			pakai dan pelimpahan perkara. Selain itu juga digunakan untuk permohonan ijin besuk, pembantaran dan ijin berobat.	
	SIRAD - Aplikasi ini merupakan aplikasi ramah difabel yang menyajikan informasi mengenai layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Maros.	Aplikasi ditujukan untuk penyandang disabilitas sehingga user interface dibuat mudah dan simpel sehingga memudahkan saat digunakan. Pada aplikasi ini terdapat fitur text to voice yang digunakan untuk mengubah informasi text menjadi suara. Untuk menggunakan fitur ini yaitu dengan cara menselect pada text informasi yang ada kemudian akan keluar suara	Masyarakat Umum dan Disabilitas	
	Aplikasi PADDAIDI - Pencarian Data & Informasi Denda Tilang	Aplikasi PADDAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang) adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pencarian informasi tilang, dimana pihak yang ingin melakukan pencarian informasi tilang cukup memasukkan nama pelanggar atau nomor polisi kendaraan atau nomor blangko tilang ataupun nomor register, baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kolom yang disediakan.	Masyarakat Pencari Keadilan	
	VIRA - Virtual Assitant PN Maros)	VIRA (Virtual Assitant PN Maros) adalah robot penjawab otomatis yang membantu untuk mengelola layanan informasi PN Maros. Aplikasi ini berupa WhatsApp Bot Auto Reply yang	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pegawai	

			dirancang untuk membalas setiap pertanyaan dan menjawab sesuai dengan data yang ada di dalam database.	
4	Pengadilan Negeri Bulukumba	Kassi pute (Kami AplikasiSSI PosbakUm Terpadu)	Tujuan Aplikasi berupa : 1. Arsip Elektronik : Pengarsipan permohonan layanan posbakum elektronik yang sistematis dan terstruktur 2. Peningkatan Pelayanan : Meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan 3. Inovasi Layanan : Perlunya membuat inovasi dalam layanan peradilan 4. Membangun ZI : Inovasi layanan untuk Pembangunan Zona Intergitas (ZI WBK WBBM) PN Bulukumba Manfaat Aplikasi KASSI PUTE 1. Memudahkan pengguna layanan dalam mengajukan permohonan layanan posbakum 2. Tidak harus datang ke pengadilan untuk mengajukan permohonan 3. Data pemohon tersip dengan baik dalam aplikasi sehingga mempermudah pengarsipan data secara elektronik e-survey pelita: adalah survey kepuasan pelayanan berbasis website yg dilengkapi dengan sistem audio sehingga membantu penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk memberikan tanggapan terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri	Masyarakat Pencari Keadilan
		e-survey pelita		Masyarakat Penyandang Disabilitas

			Bulukumba. Hal ini mendukung Undang Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 terkait semua orang berhak memperoleh perlakuan yang sama terutama mengenai pelayanan	
5	Pengadilan Negeri Mamuju	E-Penyitaan, E-Penggeledahan, E-Perpanjangan Penahanan	Layanan secara elektronik untuk mengajukan permohonan surat izin Penyitaan, ijin Penggeledahan, dan Perpanjangan penahanan pada Pengadilan Negeri Mamuju	Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan
6	Pengadilan Negeri Sengkang	SUTERA (Sistem Unggahan Terintegrasi)	Layanan yang mempermudah pengiriman dan pertukaran data persidangan. Yang terintegrasi	Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, PP, dan Penasehat Hukum.
		VIRA (VIRTUAL ASSISTANT)	VIRA (Virtual Assitant PN Sengkang) adalah robot penjawab otomatis yang membantu untuk mengelola layanan informasi PN Sengkang. Aplikasi ini berupa WhatsApp Bot Auto Reply yang dirancang untuk membalas setiap kata-kata yang mereka dapatkan dan menjawab sesuai dengan yang ada di dalam database PN Sengkang	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
		PADDAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang)	Aplikasi PADDAIDI (Pencarian Data & Informasi Denda Tilang) adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pencarian informasi tilang, dimana pihak yang ingin melakukan pencarian informasi tilang cukup memasukkan nama pelanggar atau nomor polisi kendaraan atau nomor blangko tilang ataupun nomor register, baik lengkap maupun sebagian kata/angka pada kolom	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan

			yang disediakan. Aplikasi ini terkoneksi dengan database SIPP, sehingga database tilang dalam aplikasi padaidil langsung mengambil dalam SIPP web dan tidak perlu dilakukan penginputan data manual	
7	Pengadilan Negeri Watampone	Aplikasi Tana Bangkalae	Aplikasi Tana Bangkalae yang merupakan Sistem Informasi Terpadu antara Pengadilan Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan Lapas untuk manajemen pengiriman data permohonan penetapan ijin penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan salinan putusan dan petikan putusan secara elektronik.	Pengadilan, Kejaksaan, Polisi, Masyarakat
		Aplikasi Maccani	Aplikasi Maccani, aplikasi ini adalah sebuah asisten virtual yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pengadilan baik internal dan eksternal. Untuk internal pengadilan negeri watampone dimana salah satu fiturnya dapat mengirimkan informasi Surat yang masuk ke Pengadilan Negeri Watampone melalui Whatsapp Ketua dan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk segera ditindaklanjuti. Untuk eksternal pengadilan Negeri Watampone fiturnya dapat memberi informasi tentang Informasi Perkara, Langganan Perkara, Informasi Layanan, Informasi Anggaran, Informasi Statistik, Informasi E-Court, Informasi Surat	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan

			Keterangan, Informasi Kinerja, Informasi Evaluasi, Informasi Pengaduan, Informasi Corona.	
8	Pengadilan Negeri Palopo	eForm Pengadilan Negeri Palopo	Aplikasi yang mempermudah dalam permohonan Izin/Persetujuan Pengeledahan, Izin/Persetujuan Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Penetapan Diversi ke Pengadilan Negeri Palopo	Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik Bea Cukai, Penyidik BNN
9	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	E-SIGAP (Elektronik Sistem Gapai Pelayanan PN SIDRAP)	Aplikasi E-SIGAP dirancang untuk memudahkan pengguna layanan dan pencari keadilan dalam mendapatkan akses pelayanan PN SIDRAP menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pelayanan serta mencegah penyebaran COVID-19. Menu yang disediakan E-SIGAP antara lain Menu SIPP mobile yang menampilkan fitur statistik perkara, info gugatan, serta direktori putusan PN SIDRAP. Selain itu ada menu E-PTSP yang dapat mengakses E-COURT, ERATERANG, E-BESUK, E-TILANG, E-BROSUR, menampilkan jadwal persidangan, serta dapat juga mengisi survei yang mengarah langsung ke SISUPER. Melalui E-SIGAP pula, pengguna layanan dapat melakukan pengaduan atas penyimpanan yang terjadi di PN SIDRAP.	Masyarakat Pencari Keadilan dan Pengguna Layanan Pengadilan
		E-BESUK	Sistem izin tahanan yang diajukan secara online berbasiskan website dan terintegrasi dengan sistem database tahanan/terdakwa di	Masyarakat Pencari Keadilan dan

			Rutan. Aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan izin besuk dengan pelayanan yang prima, akuntabel, dan bebas dari KKN pada PN SIDRAP. Hadinya aplikasi ini juga untuk meminimalisir adanya percabangan terkait pengajuan surat izin besuk tahanan.	Pengguna Layanan Pengadilan
10	Pengadilan Negeri Pangkajene	E-Tiang	Aplikasi untuk melihat Pencarian Data Tiang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene	Masyarakat Pencari Keadilan dan Aparat Penegak hukum
11	Pengadilan Negeri Barru	e-SPRINT (Surat Izin Penyitaan, Ijin Keluar Tahanan, Pengeledahan, dan Perpanjangan Penahanan)	Permohonan surat izin Penyitaan, ijin keluar tahanan, ijin pengeledahan, dan Perpanjangan penahanan secara elektronik	Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Rutan
12	Pengadilan Negeri Pare-Pare	E-TAHAN	Meminimalisir waktu tatap muka petugas dan pengguna layanan sehingga resiko penularan COVID-19 dan praktik KKN dapat berkurang	Penyidik dan Penuhut Umum
		C-EKS	Meminimalisir waktu tatap muka petugas dan pengguna layanan sehingga resiko penularan COVID-19 dan praktik KKN dapat berkurang	Masyarakat Umum
13	Pengadilan Negeri Pinrang	SIGAPP (Surat Izin Pengeledahan, Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Pemberitahuan Putusan)	permintaan surat izin baik surat Izin Pengeledahan, Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, dan Pemberitahuan Putusan secara online	Kepolisian,kejaksaan, Rutan
14	Pengadilan Negeri Makale	SIGUNAPERI (SISTEM PENGGUNA PENGADILAN NEGERI)	Memudahkan para pencari keadilan untuk mengakses layanan digital dari mahkamah agung, badlium, dan pn makale melalui smartphone	Masyarakat pencari keadilan

15	Pengadilan Negeri Mailiti	SI-EKO (Sistem Informasi Eksekusi Online)	Memudahkan para pencari keadilan untuk melakukan pendaftaran permohonan eksekusi di mana saja dan kapan saja.	Masyarakat pencari keadilan
16	Pengadilan Negeri Masamba	Corner Office	Pengadilan Negeri Masamba mengadakan sudut pelayanan khusus yang menyediakan perangkat computer dan printer yang dapat digunakan oleh Para Pencari Keadilan untuk mencetak dokumen dalam keadaan darurat. Hal ini mengingat sering kali Para Pencari Keadilan yang menggunakan pelayanan di Pengadilan Negeri Masamba merasa kesulitan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dokumen saat pendaftaran di PTSP karena penyedia jasa percetakan dokumen yang jauh dari lokasi kantor pengadilan.	Masyarakat Pencari Keadilan
		Flash Service	Pengadilan Negeri Masamba membuat program Flash Service sebagai salah satu jaminan terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Mayoritas Para Pencari Keadilan, utamanya dalam hal perkara perdata permohonan merupakan masyarakat kurang mampu dan tinggal jauh dari lokasi Kantor Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian untuk menyingkat waktu, jarak, dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan persidangan perkara perdata, maka Pengadilan Negeri Masamba menyelenggarakan Program Flash Service.	Masyarakat Pencari Keadilan

		SIMARTA (Aplikasi Manajemen Arsip Digital Pengadilan Negeri Masamba)	Pengadilan Negeri Masamba membuat aplikasi penyimpanan arsip secara digital untuk memudahkan para pegawai dalam penyusunan arsip sehingga pelayanan dan pencarian dokumen kepada masyarakat lebih praktis, mudah dan cepat	Pegawai
17	Pengadilan Negeri Watansoppeng	Anjungan PTSP dan Layanan informasi Mandiri	Anjungan PT SP dan layanan informasi digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memperoleh layanan online dan memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi secara mandiri serta para aparatur Pengadilan Negeri Watansoppeng bisa langsung memberikan bantuan secara langsung dengan menggunakan komputer yang sudah disediakan.	Masyarakat Pencari Keadilan
		Asisten Virtual PTSP	Asisten virtual PTSP digunakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi (informasi perkara, informasi biaya perkara, informasi e-court, informasi eraterang dll) hanya dengan cukup menggunakan whatsapp.	Masyarakat Pencari Keadilan
18	Pengadilan Negeri Jeneponto	Turatea Smart Court (Whatsapp Bot)	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pegawai dalam mencari informasi, antara lain informasi mengenai perkara, denda tilang, e-court, e-litigasi, surat keterangan, jadwal persidangan pidana dan perdata, evaluasi SIPP.	Masyarakat dan Pegawai

19	Pengadilan Negeri Bantaeng	Aplikasi ANDALAN (Asisten Digital Aparatur Peradilan) :	merupakan aplikasi "pengingat" bagi seluruh aparatut Pengadilan Negeri Bantaeng, khususnya dalam penanganan perkara. ANDALAN ini akan mengingatkan dengan dua acara, yaitu melalui grup resmi Pengadilan Negeri Bantaeng pada aplikasi whatsapp dan secara pribadi kepada pihak yang bersangkutan khususnya dalam penanganan perkara. Aplikasi ini juga menyampaikan informasi mengenai pengukuran kinerja pegawai khususnya Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita melalui grup resmi milik pengadilan Negeri Bantaeng melalui aplikasi Whatsapp. Aplikasi ini juga dapat diakses secara mandiri oleh Masyarakat luas dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor +62 823-9444- 7782 dan langsung saja ketikkan "hai" maka setelah itu ANDALAN akan merespon secara otomatis. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, Masyarakat lebih mudah mendapatkan Informasi Pengadilan setiap saat, Mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat secara langsung, Penyediaan data informasi perkara lebih real time dan validg tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan, Monitoring dan penyelesaian pekerjaan lebih cepat, Aparatur Peradilan mempunyai asisten digital yang akan selalu	Pimpinan, Seluruh Aparatur Pengadilan, Kejaksaan, Pengacara, Masyarakat
----	-----------------------------------	--	--	--

			mengingatkan beban pekerjaan masing-masing baik yang sudah selesai maupun yang harus segera diselesaikan, Efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara semakin meningkat, Pengawasan pimpinan terhadap kinerja aparaturnya pengadilan lebih maksimal	
	PTSP Online, merupakan aplikasi yang merepika layanan PTSP secara langsung menjadi Online atau Daring		Mengurangi intensitas tatap muka dalam pemberian layanan sebagai adaptasi terhadap pandemic covid-19; Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan biaya murah, mudah dan transparan; Sebagai Call Center, menerima Tamu Virtual, dan terhubung ke beberapa aplikasi seperti Aplikasi ANDALAN, Informasi Jadwal Sidang, Aplikasi e-court, Aplikasi SIPP, Aplikasi eraterang, Aplikasi Direktoi Putusan, Aplikasi e-Pastl	Masyarakat pengguna layanan
	e-PASTI (Elektronik Perkara Secara Terpadu dan Integrasi).		Mempermudah pihak terkait dalam melakukan izin dan persetujuan untuk Permohonan penggeledahan dan penyitaan, Tuntutan, dan Replik	Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian
	e-Brosur		Mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantaeng. Masyarakat hanya tinggal melakukan scan pada QR code yang tercantum kemudian akan langsung terbuka brosur yang memberikan informasi mengenai layanan pengadilan	Masyarakat

20	Pengadilan Negeri Sinjai	Inovasi Kepaniteraan Pidana yaitu Pengiriman Berkas Melalui Email (E- Pidana) Kepada Pihak Pihak yang membutuhkan (Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas)	Pengiriman berkas yang dilakukan secara online kepada penyidik, Kejaksaan dan Rutan dimana berkas dikirim melalui email Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas yang di sebut E-Pidana (Email Pidana). Sehingga data bisa tersampaikan dengan tepat waktu, serta disertai dengan pengiriman berkas fisik kepada pihak Penyidik, Kejaksaan, Rutan dan Bapas, ataupun pihak penerima dapat mengambil berkas fisik setelah mendapatkan berkas secara elektronik.	Polisi, Jaksa, Rutan, Bapas
		Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Sinjai melalui Whatsapp SILANJI (Sistem Informasi Pelayanan Pengadilan Negeri Sinjai)	Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang perkara, jadwal sidang, sidang perkara lalu lintas (denda tilang), pengadilan dan tentang biaya perkara yang bisa didapatkan melalui WA di 085299913966, masyarakat melakukan pencarian informasi dengan menggunakan kode atau format yang tersedia sesuai kebutuhan dan kemudian dibalas secara otomatis oleh sistem yang terhubung di aplikasi Whatsapp.	Masyarakat
21	Pengadilan Negeri Selayar	Silajara (Sistem Informasi Layanan dan Jaminan Prioritas), Silajaran adalah inovasi bagi stakeholder pengadilan negeri selayar yang memiliki kebutuhan khusus/prioritas berupa pendaftaran kebutuhan peralatan	Silajara bermanfaat untuk mempersiapkan kebutuhan peralatan prioritas agar pelayanan yang didapatkan bisa efektif dan efisien	Semua Stakeholder Pengadilan

		secara online sebelum datang ke pengadilan		
		Wspasatu = Website Pelayanan Disabilitas Terpadu (WSPASATU PN Selayar) Wspasatu adalah inovasi berupa pembuatan website terpadu dan terintegrasi dengan seluruh pelayanan disabilitas di Pengadilan Negeri Selayar dalam 1 Website.	Wspasatu bisa diakses oleh dua pengguna yaitu Pengguna Layanan dan Pemberi Layanan. Bagi Pengguna Layanan, Wspasatu berisi semua media informasi tentang fasilitas pelayanan disabilitas di PN Selayar dan Petugas Pemberi Layanan, Wspasatu berisi pedoman pelayanan disabilitas.	Semua Stakeholder Pengadilan
		PTSP Online adalah inovasi berupa layanan PTSP secara online melalui zoom yang selalu aktif setiap saat	Mempermudah stakeholder pengadilan yang mempunyai kebutuhan dengan ptsp pengadilan sehingga tidak perlu datang ke kantor. Hal ini juga bermanfaat bagi pengguna layanan yang berada di kepuualan	Semua Stakeholder Pengadilan
		E-Brosur E- Brosur Produk Layanan Brosur Audio Visual Mempermudah para pencari keadilan baik umum , prioritas maupun penyandang disabilitas karena dapat diakses Kapanpun dan dimanapun, Terdapat fitur khusus disabilitas yaitu Audio Visual yang terdapat di Web Pengadilan Negeri Selayar dan terdapat E-Brosur yang dapat diakses masyarakat umum dengan cara QR Code pada web Pengadilan Negeri Selayar	Bermanfaat bagi Masyarakat umum, maupun Penyandang disabilitas yang akan datang ke Pengadilan Negeri Selayar, sehingga dapat mengetahui terlebih dahulu informasi persyaratan produk layanan yang dibutuhkan	Semua Stakeholder Pengadilan

		SI ADI	Sistem Informasi Absensi Digital merupakan inovasi pengadilan negeri selayar berupa aplikasi absensi diwaing pad website untuk mengurangi kontak dan mengurangi penggunaan kertas pada saat rapat kantor. Aplikasi ini digunakan untuk rapat internal maupun rapat eksternal.	Semua Stakeholder Pengadilan
		ARSIMAN	Aplikasi ARSIMAN merupakan Inovasi Pengadilan Negeri Selayar dalam bidang tata kelola Arsip yang dimulai dengan Digitalisasi arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Arsip digital ini sebagai backup arsip untuk kemudian dikembangkan pada digitalisasi arsip-arsip bidang lainnya.	Pegawai
		Monitoring Pengadilan Negeri Selayar	Untuk memudahkan Pekerjaan aparatur Pengadilan Negeri Selayar dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan, pengadilan Negeri Selayar telah berinovasi dengan Membuat satu website yang mengintegrasikan seluruh aplikasi Mahkamah Agung didalam satu media sehingga untuk mengakses berbagai aplikasi Mahkamah Agung cukup dengan membuka website Monitoring Pengadilan Negeri Selayar dan memilih aplikasi yang dituju.	Pegawai
		Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri Selayar	Sebagai sarana pendukung para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Selayar berinovasi membuat Anjungan Mandiri PTSP Pengadilan Negeri Selayar. Dalam inovasi	Semua Stakeholder Pengadilan

			tersebut disediakan 1 Unit Personal Komputer dan 1 Unit Printer yang berfungsi membantu para pencari keadilan untuk mengecek kebutuhan persyaratan dokumen sehingga Ketika dibutuhkan untuk memperbanyak hasil dokumen maupun perubahan data dokumen, para pengunjung tidak perlu keluar kantor dan bisa di lakukan langsung di Anjungan Mandiri PTSP langsung di Anjungan Mandiri PTSP pengadilan Negeri Selayar.	
		Antrian PTSP	Untuk menunjang kualitas dan ketertiban dalam memberikan kepada masyarakat. PTSP Pengadilan Negeri Selayar dilengkapi dengan sistem antrian yang terintegrasi dengan meja pelayanan, Petugas meja informasi akan memandu pengunjung untuk mengambil kertas antrian melalui mesin print thermal kemudian petugas meja informasi.	Semua Stakeholder Pengadilan
		Aplikasi Permintaan Barang ATK (e-Permak)	Aplikasi ini merupakan inovasi Pengadilan Negeri Selayar untuk mengurangi penggunaan kertas dalam hal permintaan barang ATK yang dilakukan setiap bulannya.	Pegawai
22	Pengadilan Negeri Takalar	SMS Gateway	Aplikasi layanan pesan singkat (SMS) yang berfungsi untuk mengetahui info perkara, info jadwal sidang mendatang, info biaya perkara perdata dan info perkara lalu lintas (tilang)	Semua Stakeholder Pengadilan
		Whatsapp Bot	Aplikasi penjawab chat otomatis untuk mendapatkan informasi terkait perkara dan informasi layanan pengadilan	Semua Stakeholder Pengadilan

		Si Daeng Taka	Aplikasi berbasis android sebagai media untuk mempermudah mengakses informasi-informasi yang ada di Pengadilan Negeri Takalar	Semua Stakeholder Pengadilan
23	Pengadilan Negeri Enrekang	DANGKE (Pengegledaan, Penyitaan, Tuntutan, Perpanjangan Penahanan, dan Dakwaan Secara Elektronik) SIMANIS (Sistem Manajemen Informasi PN Enrekang) Simanis adalah Asisten Virtual yang akan membantu menjawab pertanyaan Anda mengenai informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Enrekang. Akses SIMANIS dengan Search Link https://bit.ly/SimanisPNEnrekang	PN Masamba mengadakan sudut pelayanan khusus dengan menyediakan perangkat komputer dan printer yang dapat digunakan oleh Para Pencari Keadilan untuk mencetak dokumen dalam keadaan darurat.	
24	Pengadilan Negeri Belopa	e-Tilang (Aplikasi Pencarian Data Tilang)	Pencarian Data Tilang bertujuan memudahkan Masyarakat dalam mencari berkas tilang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Aplikasi ini dapat di akses melalui website pn-belopa.go.id pada menu Layanan Publik -> Informasi Perkara -> Pencarian tilang. Pada kolom yang disediakan silahkan ketik Nomor Tilang atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), kemudian tekan Enter/klik Go.	Masyarakat Pencari Keadilan

D. E-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Tabel V.3 Data Pelaksanaan e-Berpadu Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	SATUAN KERJA	PELIMPAHAN BERKAS PERKARA		PENGELEDAHAN	PENYITAN	PERPAUJANGAN PEMAHAMAN	IJIN BESUK		PINJAM PAKAI		DIVERSI		PEMBATARAN
		Pelimpahan	Perkara Terdasar				Proses	Selesai	Proses	Selesai	Proses	Selesai	
1	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	8	36	219	710	807	137	6	0	0	1	3	0
2	PENGADILAN NEGERI SINGGAMASA	4	152	79	203	159	0	0	1	3	0	3	0
3	PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE	1	20	25	98	23	0	17	0	9	0	2	0
4	PENGADILAN NEGERI BARU	0	37	18	56	30	0	10	1	1	0	0	0
5	PENGADILAN NEGERI TAKALAR	2	51	36	91	48	0	0	0	0	0	9	0
6	PENGADILAN NEGERI MAROS	5	81	12	97	40	6	183	0	13	0	4	2
7	PENGADILAN NEGERI JENEPONTO	1	41	24	73	39	0	1	0	0	0	2	0
8	PENGADILAN NEGERI PARE-PARE	0	76	20	62	40	1	135	0	5	0	8	0
9	PENGADILAN NEGERI ENREKANG	0	23	6	59	15	0	11	0	1	0	2	0
10	PENGADILAN NEGERI SORAP	0	58	46	87	54	0	96	1	0	0	3	0
11	PENGADILAN NEGERI PIRANG	1	43	20	50	40	1	398	0	7	0	0	0
12	PENGADILAN NEGERI WATAMPONE	0	129	70	252	27	0	188	0	0	1	9	2
13	PENGADILAN NEGERI WATANSOPENG	0	20	5	58	2	0	16	0	1	0	4	0
14	PENGADILAN NEGERI SENGKANG	1	64	45	111	69	0	4	0	1	1	1	0
15	PENGADILAN NEGERI BAITAENG	0	41	15	127	19	0	55	0	0	0	2	0
16	PENGADILAN NEGERI SUIJAI	2	39	30	102	4	0	10	0	4	0	0	0
17	PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA	0	89	22	82	64	0	7	0	4	0	0	0
18	PENGADILAN NEGERI SELAYAR	2	18	11	43	14	0	18	0	0	0	2	0
19	PENGADILAN NEGERI PALOLO	1	63	30	76	56	0	3	0	2	0	4	0
20	PENGADILAN NEGERI MAKALE	2	12	2	36	9	1	32	0	2	0	0	0
21	PENGADILAN NEGERI MASAMBA	2	51	54	187	23	0	0	0	0	0	2	0
22	PENGADILAN NEGERI MALILI	0	60	56	119	70	0	0	0	0	0	2	0
23	PENGADILAN NEGERI BELLOA	0	38	19	66	58	0	1	0	2	0	3	0
	JUMLAH												

Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar merupakan pilot project aplikasi e-berpadu namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami satuan kerja.

Tabel V.4. Kendala/Hambatan Pelaksanaan e-Berpadu pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar

NO	SATUAN KERJA	KEADAAN/HAMBATAN E-BERPADU
1	Pengadilan Negeri Makassar	1. Hambatan terkendala di penyidik dan penuntut umum dengan alasan dokumen yang di input pada aplikasi e-Berpadu sangat banyak. 2. Pihak penyidik dan penuntut umum kurang mengetahui aplikasi e-Berpadu.
2	Pengadilan Negeri Sungguminasa	1. Pada permintaan izin sita khusus diminta memasukkan sprint sita dan BA sita, sedangkan dalam hal ini penyidik belum melakukan penyitaan; 2. Pada permohonan izin sita dapat berasal dari tersangka maupun dari saksi; 3. Mengenai pelimpahan berkas tersangka dari kejaksaaan kepada pengadilan, penyidik pembantu diarahkan oleh kejaksaaan untuk menginput semua data kelengkapan, sedangkan nomor surat ataupun dokumen lainnya yang berasal dari Kejaksanaan dan Pengadilan tidak diketahui oleh penyidik; 4. Penetapan yang telah di TTE terkadang tidak dapat diunduh dari E-berpadu penyidik sehingga harus dikirim secara manual kepada penyidik yang bersangkutan; 5. Pada penetapan terkadang hanya terdapat satu nama terdakwa, sedangkan pada kolom terdakwa telah diinput seluruh nama terdakwa; 6. Mengenai perbaikan berkas pelimpahan, mohon agar melakukan penghapusan pada permohonan yang statusnya masih perbaikan, namun sebenarnya telah dikirim kembali kelengkapan dokumennya dari kejaksaaan; 7. Rutan Makassar belum dimasukkan dalam E-Berpadu sehingga tidak bisa terkoneksi, sementara tahanan Pengadilan Negeri Sungguminasa ditiptikan di Rutan Makassar. Sehubungan dengan itu, kami juga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi untuk izin besuk dikarenakan hal yang sama; 8. Untuk Diversi yang baru masuk langsung menuju ke fitur proses tanpa melalui fitur pengajuan; 9. Untuk Tanda Tangan Elektronik KPN sering gagal terinput; 10. Apabila permohonan berasal dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang belum memberlakukan E-berpadu, maka penetapan harus diproses secara manual sehingga terdapat dua versi penyelesaian secara manual dan elektronik

3	Pengadilan Negeri Pangkajene	Kedaaan: Untuk e-Berpadu bersi 2 lebih baik dari versi 1 dikarenakan sudah ada fitur perbaikan untuk e-Sita, e-Geledah, e-Penahanan dan e-Diversi sehingga ketika ada kesalahan penyidik tidak perlu mengajukan ulang dari awal lagi. Hambatan: 1. ketika ada pengajuan e-Sita dari Kejaksaan untuk kasus tipikor, dan belum ada tersangkanya tetapi baru ada saksi, mungkin bisa ditambahkan fitur Data Saksi 2. terdapat penyidik yang mengajukan permohonan pencabutan Penetapan e-Sita dikarenakan ada perubahan item baang yang disita, sedangkan penetapannya sudah keluar di e-Berpadu 3. untuk e-Penahanan Pasal 25, untuk perkara tipikor, tidak ada pilihan jenis perkara pidana khusus
4	Pengadilan Negeri Barru	1. hambatan berasal dari satker lain (Kepolisian dan Kejaksaan) terkait penginputan pelimpahan berkas perkara, pengeledahan, penyitaan, maupun perpanjangan penahanan, yang seringkali keliru dalam mengisi kolom-kolom dan penginputan data dalam aplikasi e-Berpadu 2. dokumen yang telah dotandatangani secara elektronik oleh Ketua/Wakil Ketua tidak dilihat lagi oleh akun pejabat dimaksud 3. terkait menu dalam aplikasi, seperti menu izin besuk dan pinjam pakai, yang kewenangannya berada dalam ranah Hakim/Majelis pemeriksa perkara, namun Hakim belum memiliki akun tandatangan elektronik terdaftar
5	Pengadilan Negeri Takalar	1. Tanda tangan elektronik sering mengalami error. 2. Dokumen yang diinput oleh penyidik dan penuntut umum seringkali salah/ tidak lengkap dengan alasan dokumen yang harus diinput terlalu banyak.
6	Pengadilan Negeri Maros	1. Kendala Jaringan. Pelimpahan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Aplikasi e-Berpadu kadang mengalami gangguan, sehingga tidak dapat terbaca secara langsung di e-Berpadu Pengadilan Negeri Maros, sehingga disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum melakukan penginputan kembali pelimpahan perkara yang mengakibatkan data perkara pada Aplikasi e-Berpadu terbaca ganda; 2. Pelimpahan dari Polda Sul-Sel terkendala karena hanya ada 1 (satu) admin di Polda Sul-Sel, dan admin tersebut tidak semuanya penyidik dibuatkan akun, sedangkan di Polda banyak penyidik yang terdiri dari : Satuan Kriminal Umum, Narkoba, Kriminal Khusus, Satuan Lalu Lintas, yang akan melakukan pelimpahan, sehingga ketika terdapat masalah pelimpahan dari Penuntut umum ke Pengadilan Negeri Maros, pihak Pengadilan Negeri Maros kesulitan dalam berkoordinasi dengan Penyidik yang melakukan penyidikan perkara tersebut; 3. Aplikasi e-Berpadu sering mengalami gangguan/error; 4. Penyidik dari Polda Sul-Sel, Polres Maros, Polsek se- Polres Maros serta penuntut Umum masih banyak yang belum menguasai Aplikasi e-Berpadu.

7	Pengadilan Negeri Jeneponto	1. Pada akun APH beberapa tidak bisa input Data Tersangka 2. Tidak dapat muncul catatan perbaikan pada halaman awal tampilan berkas 3. Pencatatan perbaikan kepada APH yang mengajukan tidak ditindak lanjut sehingga menjadi tunggakan dalam kolom pengajuan (sudah diberitahukan melalui surat dan diberitahukan langsung)
8	Pengadilan Negeri Pare-Pare	1. Jika ada kekurangan berkas dari Penyidik dan Kejaksaaan sudah verifikasi, maka sudah tidak bisa ditambahkan atau diedit. 2. Permintaan dari Aparat Penegak Hukum (APH) lain agar bisa pakai nama Terdakwa, tidak menggunakan nomor, atau ditambahkan nama di bawah nomor sebelum diilmpah ke Pengadilan Negeri.
9	Pengadilan Negeri Enrekang	1. Pihak penyidik dan penuntut umum masih banyak yang belum menguasai aplikasi e-Berpadu.
10	Pengadilan Negeri Sidrap	1. Sinkronisasi antara Aplikasi E-Berpadu dengan PTSP+ terkait Penyitaan dan Pengeledahan 2. Double data tersangka / Jaksa setelah dilakukan sinkronisasi antara e-Berpadu dan SIPP 3. Double data riwayat penahanan apabila sinkronisasi e-berpadu dan SIPP, namun ada beberapa yang tidak input riwayat penahanan sehingga di SIPP tidak ada riwayatnya
11	Pengadilan Negeri Pinrang	1. Permasalahan Sinkron antara E-Berpadu dan SIPP jika tombol Sinkronisasi eBerpadu di klik, data akan terduplikat setiap kali di sinkron. 2. Permasalahan Sinkron antara E-Berpadu dan SIPP Biodata Jaksa dan Terdakwa akan terduplikat didata referensi SIPP, sehingga data jaksa yang sama menjadi sangat banyak. 3. Edoc dakwaan masih harus diupload manual ke SIPP. 4. Jika data Sita, Geledah, Perpanjangan Penahanan, dan Pelimpahan telah di Verifikasi oleh pengadilan dengan status Lengkap. Pelimpahan tidak dapat dikembalikan lagi (Untuk merubah data Pelimpahan sudah tidak dapat dilakukan), ini dapat menjadi masalah apabila ternyata data Pelimpahan masih terdapat data yang salah, karena tidak dapat diperbaiki kembali.
12	Pengadilan Negeri Matampone	1. Untuk permohonan izin besuk, notifikasi pemberitahuan whatsapp baik konfirmasi permohonan dan validasi permohonan beberapa kali tidak sampai ke Penerima Layanan 2. Untuk pelimpahan, beberapa kali berkas harus dinyatakan tidak lengkap dikarenakan ada kesalahan penginputan masa penahanan oleh Kejaksanaan di E-Berpadu
13	Pengadilan Negeri Watansoppeng	1. Tanda Tangan Elektronik sering mengalami error 2. Kadang dokumen kelengkapan sita/geledah sudah diupload oleh penyidik, tetapi tidak muncul 3. Tanda Tangan Elektronik untuk Izin Besuk tidak tersedia
14	Pengadilan Negeri Sengkang	1. DATA PERKARA GANDA KETIKA PROSES SINKRONISASI ANTARA sipp DAN E-BERPADU 2. Riwayat penahanan tidak memunculkan semua status penahanan. Misalnya penahanan Penyidik, perpanjangan penahanan JPU, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang muncul hanya sebagian (penahanan Penyidik saja, penahanan JPU saja atau penahanan Ketua Pengadilan Negeri saja)

15	Pengadilan Negeri Bantaeng	1. Adanya ketidaksesuaian antara data yang di input dan dokumen yang diunggah 2. Kurangnya pemahaman dari pemohon/pengguna layanan persyaratan yang wajib diunggah 3. Tidak terdapat opsi pengunggahan dokumen penetapan penahanan dari pelaksanaan untuk layanan perpanjangan penahanan
16	Pengadilan Negeri Sinjai	1. penyidik sering salah menginput dalam pengajuan dan penetapan penyitaan, pengeledahan dan perpanjangan penahanan dan setelah pengajuan ditolak terkadang seminggu baru diajukan kembali untuk diproses 2. untuk pelimpahan perkara indetitas terkadang tidak diupload oleh penyidik
17	Pengadilan Negeri Bulukumba	1. Masyarakat pencari keadilan kurang mampu memahami cara mengoperasikan layanan e-berpadu seperti izin besuk dan pinjam pakai 2. Masih ada beberapa permohonan penetapan penyitaan/pengeledahan/perpanjangan penahanan yang diajukan APH tidak sesuai dengan jam operasional pengadilan 3. Notifikasi TTE berkas tidak ada, sehingga petugas harus memberitahukan secara manual kepada pejabat yang melakukan TTE tersebut 4. Sinkronisasi e-berpadu dengan SIPP atau sebaliknya: - untuk perkara anak tidak sempurna, dikarenakan data terkadang tidak masuk pada SIPP. Meskipun data tersebut sudah terinput di e-berpadu. - tidak menarik keseluruhan data yang diperlukan oleh SIPP sehingga masih terdapat data yang harus diisi lagi pada SIPP. - Apabila sinkronisasi dilakukan pada SIPP maka data yang ada menduplikasi dengan sendirinya tetapi tidak dalam keadaan terisi sehingga terbaca tidak lengkap pada MIS padahal sebelumnya data tersebut sudah terisi. 5. Masih ada kesalahan pemilihan lokasi pengadilan yang dituju dalam proses pengunggahan berkas oleh APH 6. Belum ada fitur dokumen surat tanda penerimaan barang sitaan dan surat penetapan status barang sitaan (perkara narkoba) pada pelengkap berkas permohonan sita geledah
18	Pengadilan Negeri Selayar	1. Jenis Pidana hanya terdiri dari Pidana Biasa, Singkat dan Anak kiranya dapat ditambahkan untuk jenis Pidana Khusus. 2. Berita acara Eksekusi belum termuat dalam E-Berpadu kiranya dapat ditambahkan sehingga mudah diakses.
19	Pengadilan Negeri Palopo	1. Sistem masih sering terganggu; 2. Notifikasi permohonan tidak ter'ihat; 3. Urutan permohonan acak.
20	Pengadilan Negeri Makale	1. Masyarakat pencari keadilan kurang mampu memahami cara mengoperasikan layanan e-berpadu seperti izin besuk dan pinjam pakai barang bukti. 2. Masih ada beberapa permohonan penetapan penyitaan/pengeledahan/perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penyidik dan JPU tidak sesuai dengan jam operasional di Pengadilan serta masih adanya ketidak sesuaian antara data yang di input dan dokumen yang diunggah.

21	Pengadilan Negeri Masamba	TIDAK ADA KENDALA
22	Pengadilan Negeri Malli	1. Pelimpahan perkara (terkadang ada perkara split yang diimpah hari yang berbeda oleh kejaksaan sehingga perkara terpisah majelis hakimnya). 2. Terkait pengajuan ijin pinjam pakai oleh masyarakat yang berkepentingan, tidak dapat mengajukan ijin pinjam pakai jika dokumen kepemilikan tidak ada sedangkan ada beberapa barang bukti yang tidak memiliki dokumen kepemilikan seperti beras yang diproduksi sendiri dan lain-lain; 3. Nama terdakwa yang kurang sesuai dengan dokumen sudah tidak dapat diperbaiki jika sudah diimpah ke Pengadilan.
23	Pengadilan Negeri Belopa	1. kurang fasilitas dan sumber daya manusia dipihak mitra kerja dalam mengoperasikan aplikasi e-berpadu 2. kurang mendukung perangkat (laptop) dari pihak mitra kerja Kepolisian (Penyidik) untuk mengoperasikan aplikasi e-berpadu 3. penunjukan Admin APH pada mitra kerja seharusnya bukan Penyidik pada Kepolisian. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran akun penyidik tidak dapat digunakan e-mail yang sama ini menyebabkan penyidik harus membuat e-mail baru yang tidak sama dengan admin APH yang sudah terdaftar sebelumnya 4. kurangnya antusias pada mitra kerja dalam menggunakan aplikasi e-Berpadu sebagai sarana mempermudah tugas 5. e-Berpadu tidak terkoneksi dengan Aplikasi PTSP+ sehingga setiap permohonan yang masuk melalui e-Berpadu harus diinput ulang di Aplikasi PTSP+ supaya tercatat sebagai surat masuk

BAB VI PENGAWASAN

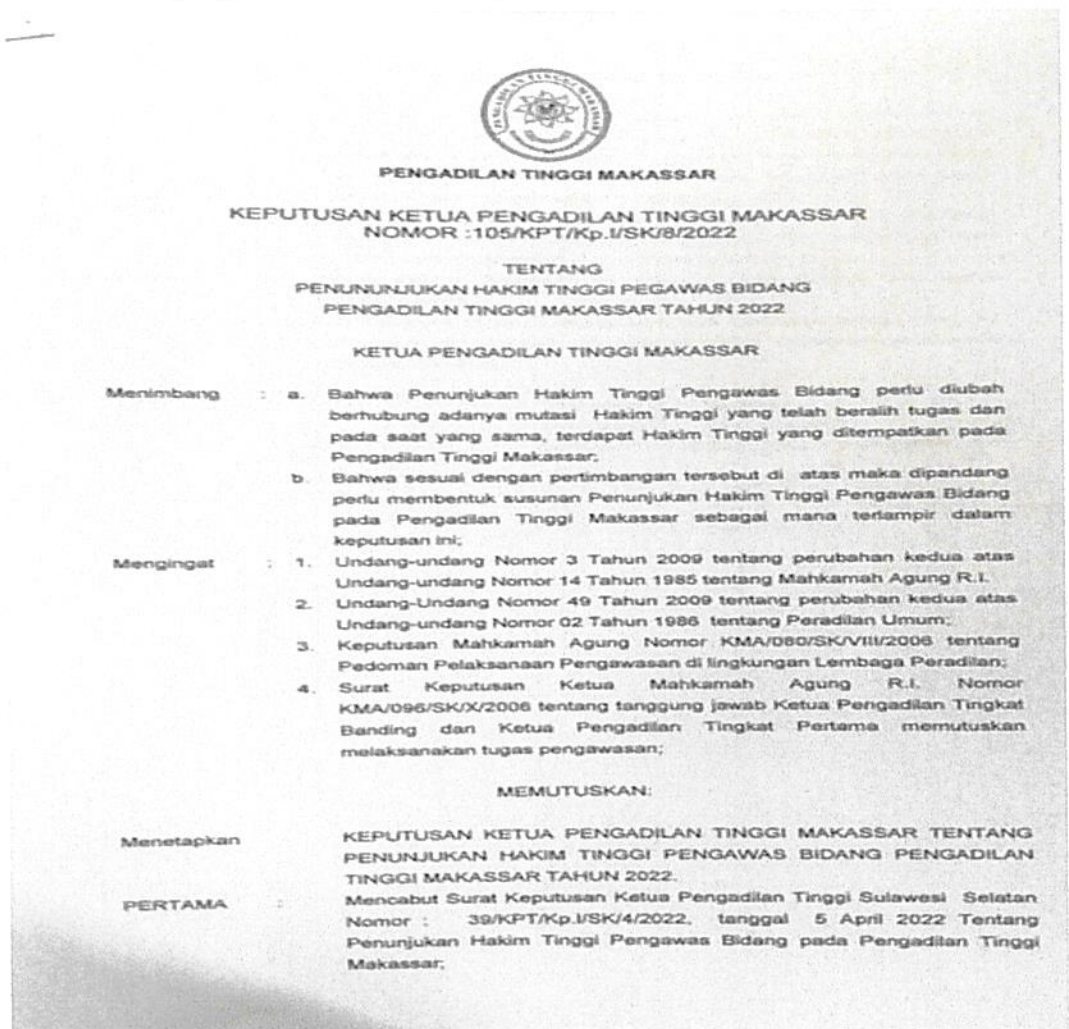
A. Internal

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar melakukan pengawasan bidang oleh Hakim Pengawas Bidang baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri dilakukan oleh Hakim Pengawas Daerah.

Untuk melakukan Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menunjuk Hakim Tinggi dengan Surat Keputusan. Selama Tahun 2021 karena ada mutasi Hakim Tinggi maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Pengawas Daerah dan Pengawas Bidang terdapat beberapa revisi sebagai berikut:

1. Pengawas Bidang:

SK Pengawas Bidang tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 105/KPT/Kp.I/SK/8/2022. Untuk Pengawasan Bidang dilakukan secara berkala setiap bulan dan hasilnya dilaporkan pada saat pelaksanaan Rapat setiap bulan dan dilakukan pembahasan atas temuan yang ada untuk dilakukan perbaikan dan mencari solusinya.

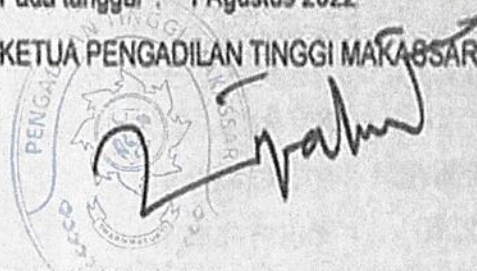


- KEDUA : Menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan di bawah ini;
- KETIGA : Melakukan pengawasan pada bidang-bidang yang ditentukan secara teratur, rutin setiap bulan, yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar setiap 3 (tiga) bulan melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Koordinator Pengawasan;
- KEEMPAT : Tata cara pengawasan berpedoman pada Lampiran I, II, III SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan;
- KELIMA : Melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR


Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

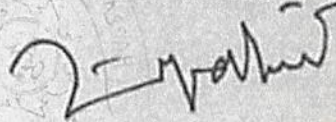
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 NOMOR : 105/KPT/Kp.I/SK/B/2022
 TANGGAL : 1 Agustus 2022

**SUSUNAN HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
 PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 2021**

NO	NAMA	PENGAWASAN
A.	WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR (Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H.)	KOORDINATOR PENGAWASAN
B.	1. Makkasau, S.H., M.H. 2. Yunus Sesa, S.H., M.H. 3. Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. 4. H. Sulthoni, S.H., M.H. 5. H. Sutio Jumagi Akhimo, S.H., M.Hum.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI KEPANITERAAN PIDANA
C.	1. Hj. Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H., M.H. 2. Daniel Palittin, S.H., M.H. 3. Harini, S.H., M.H. 4. Reno Listowo, S.H., M.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI KEPANITERAAN PERDATA
D.	1. Muhammad Damis, S.H., M.H. 2. Lambertus Limbong, S.H. 3. Bhaskara Praba Bharata, S.H. 4. Bambang Setiyanto, S.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI KEPANITERAAN HUKUM
E.	1. Gerchat Pasaribu, S.H., M.H. 2. Dr. Tamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. 3. Mulijanto, S.H., M.H., 4. Mochamad Ilyas, S.H., M.H. 5. Eko Karyadi, S.H., M.H. 6. Hasdiawati, S.H., M.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM AD HOC HAKIM AD HOC HAKIM AD HOC KEPANITERAAN TIPIKOR
F.	1. I Gede Suarsana, S.H. 2. Musthofa, S.H. 3. Puji Harian, S.H., M.Hum. 4. Martin Ponto Bidara, S.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
G.	1. Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. 2. Tahsin, S.H., M.H. 3. Dr. Tamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M. 4. Rerung Patong Loan, S.H., M.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
H.	1. Ferdinandus.B., S.H., M.H. 2. Usaha Ginting, S.H., M.H. 3. Hari Widodo, S.H., M.H. 4. H. Minaroer Rachman, S.H., M.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI

NAMA		PENGAWASAN
1. Martinus Bala, S.H., M.H.	KOORDINATOR HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM ANGGARAN
2. Pudji Tri Rahadi, S.H.		
3. Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.		

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Dr. SYAHRIL SIDIK, S.H., M.H.

2. Pengawas Daerah:

Tanggal 29 Juli 2022 Nomor 104/KPT/Kp.I/SK/7/2022

Untuk Pengawasan Daerah dilakukan pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Satuan Kerja Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun apabila diperlukan dapat dilakukan pengawasan secara esidentil kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Laporan dikirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Untuk pelaksanaannya baik Pengawasan Bidang maupun Pengawasan Daerah Hakim Tinggi dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Struktural serta staf. Berikut ini kami lampirkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dan Barat Tahun 2022.



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 104/KPT/Kp.I/SK/7/2022

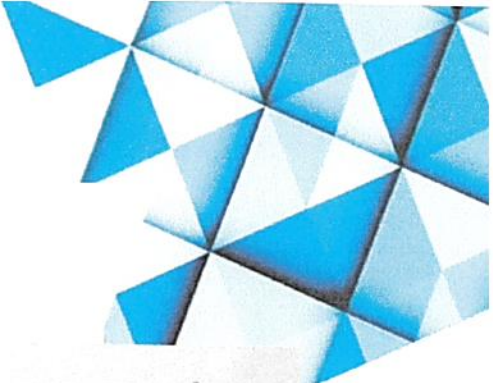
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PEGAWAS DAERAH
PADA PENGADILAN NEGERI SE-SULAWESI SELATAN DAN BARAT
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah perlu diubah
berhubung adanya mutasi Hakim Tinggi yang telah beralih tugas dan
pada saat yang sama, terdapat Hakim Tinggi yang ditempatkan pada
Pengadilan Tinggi Makassar;
- b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang
perlu membentuk susunan Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah
yang susunannya sebagai mana terlampir dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor
KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat
Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan
melaksanakan tugas pengawasan;

MEMUTUSKAN:

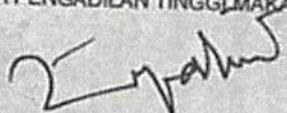
- Menetapkan KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PADA
PENGADILAN NEGERI SE-SULAWESI SELATAN DAN BARAT TAHUN
2022.
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan
Nomor : 128/ KPT/Kp.I/SK/10/2021, tanggal 8 Oktober 2021 Tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi
Makassar;

- 
- KEDUA : Menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan di bawah ini;
- KETIGA : Tata cara pengawasan berpedoman pada Lampiran I, II, III SK Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan;
- KEEMPAT : Setiap kegiatan yang dilaksanakan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, di damping sekretaris sebagai notulis dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah;
- KELIMA : Melaksanakan Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 29 Juli 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR


Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

PENUNJUKAN HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
 PENGADILAN NEGERI SE-SULAWESI SELATAN DAN BARAT
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
1.	1) HARINI, S.H., M.H. 2) H. SULTHONI, S.H., M.H. 3) PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. 4) MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H. 5) PUJI HARIAN, S.H., M.Hum. 6) MULJANTO, S.H., M.H. 7) MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H. KEPANITERAAN : ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM AD HOC HAKIM AD HOC KESEKRETARIATAN : INGGOU DAVID PURBA, S.Kom., S.H., M.H.	WILAYAH I	1. PN. MAKASSAR 2. PN. SUNGGUMINASA
2.	1) H. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H. 2) BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. 3) MARTINUS BALA, S.H. 4) YUNUS SESA, S.H., M.H. 5) USAHA GINTING, S.H., M.H. 6) PUDJI TRI RAHADI, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	WILAYAH II	1. PN. TAKALAR 2. PN. BANTAENG 3. PN. JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
	KEPANITERAAN : 1) JABAL NUR AS, S.Sc., M.H. 2) BASO RASYID, S.H., M.H. 3) RECKY NELSON, S.H. 4) SURHATTA, S.H.	KESEKRETARIATAN 1) KASMAWATI, S.Kom. 2) AHMAD FIRDAUS, S.Kom. 3) AHYADI JUSAEMAN, S.E., M.Si. 4) DEVITA KURNIA SARI, A.Md.		
3.	1) MAKKASAU, S.H., M.H. 2) TITUS TANDI, S.H., M.H. 3) H. SULTHONI, S.H., M.H. 4) JHON H. BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H. 5) H. MUSTARI, S.H. 6) LAMBERTUS LIMBONG, S.H. KEPANITERAAN: 1) H. SYAHRIR DAHLAN, S.H. 2) MANSYUR, S.E., S.H., M.H. 3) H. DARMAWATI, S.H., M.H. 4) SITI SOHORAH HANNAN, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI KESEKRETARIATAN 1) MURSYID SALEH, S.E. 2) YUSI TRIANY SINAGA, S.E., M.H. 3) INGGOU DAVID PURBA, S.Kom., S.H., M.H. 4) RIO RAKHMAT ANUGRAH H., S.E.	WILAYAH III	1. PN. BULUKUMBA 2. PN. SELAYAR 3. PN. SINJAI
4.	1) HARI WIDODO, S.H., M.H. 2) Dr. TAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. 3) MUSTHOFA, S.H. 4) I GEDE SUARSANA, S.H. 5) YANCE BOMBING, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI	WILAYAH IV	1. PN. WATANSOPPENG 2. PN. WATAMPONE 3. PN. SENGKANG



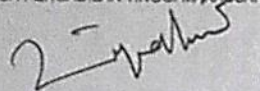
NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
6)	RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI		
	KEPANITERAAN 1) Drs. Djameluddin DN., S.H., M.Hum. 2) ANDI FAJAR MENYINGSING, S.H. 3) TASWIN, S.H., M.H. 4) H. MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H. 5) DERMAWAN TAHIR, S.H., M.H.	1) AHMAD FIRDAUS, S.Kom. 2) MAHDALENA REHULINA GINTING, S.E. 3) AISYA RIZKI ASTARI, S.Kom. 4) SASMITO SUGIANTO, Amd.		
5.	1) FERDINANDUS B, S.H., M.H. 2) GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. 3) DANIEL PALITTIN, S.H., M.H. 4) BUDHY HERTANTYO, S.H., M.H. 5) RENO LISTOWO, S.H., M.H. 6) BAMBANG SETTYANTO, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI		
	KEPANITERAAN 1) BASO RASYID, S.H., M.H. 2) H. SYAHRIR DAHLAN, S.H. 3) HJ. HAMISA, S.H., M.H. 4) H. M. CHANDRA PS., S.Sos., S.H., M.H. 5) ZUHRİYAH, S.H. 6) ANDI MAULANA, S.H., M.H.	KESEKERTARIATAN : 1) MUHAMMAD AZWAR, S.E., M.M. 2) ANDHIKA ZATWIKA, S.H. 3) HASBULLAH 4) PUTRI MAYA SARI SIHALOHO, A.Md	WIAYAH V	1. PN. MAROS 2. PN. PANGKEP 3. PN. BARRU 4. PN. PAREPARE

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
6.	1) H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.H. 2) MAS'UD, S.H., M.H. 3) H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H. 4) MARTIN PONTO BIDARA, S.H. 5) Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H. 6) MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI		
	KEPANITERAAN : 1) JABAL NUR AS, S.Sos., M.H. 2) MARWATI, S.H. 3) ZUHRİYAH, S.H. 4) Drs. KADIR GALA, S.H. 5) JOHASANG, S.H. 6) SAPARUDDIN, S.H.	KESEKRETARIATAN : 1) MUHAMMAD AZWAR, S.E., M.M. 2) AHMAD FIRDAUS, S.Kom. 3) TEGUH PRASETYO AJI, S.H. 4) AKBAR SUMITRO, S.IP 5) GUNAWATI FATIMAH FITRI, G, A.Md	WILAYAH VI	1. PN. PINRANG 2. PN. POLEWALI 3. PN. MAJENE
7.	1) MAKASAU, S.H., M.H. 2) H. MUSTARI, S.H. 3) HARI WIDODO, S.H., M.H. 4) BUDHY HERTANTYO, S.H., M.H. 5) H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H. 6) H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI		
			WILAYAH VII	1. PN. PALOPO 2. PN. MASAMBA 3. PN. MALILI 4. PN. BELOPA

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
	KEPANITERAAN : 1) BASO RASYID, S.H., M.H. 2) TIMANG, S.H. 3) ANDI HAJERAWATI, S.H. 4) SITI SOHORAH HANNAN, S.H. 5) Dr. Hj. ST NAISJAH, S.H., M.H.	KESEKRETARIATAN : 1) MURSYID SALEH, S.E. 2) YUSI TRIANY SINAGA, S.E., M.H. 3) RIO RAKHMAT ANUGRAH H., S.E. 4) DEVITA KURNIA SARI, A.Md.		
8.	1) MARTINUS BALA, S.H. 2) FERDINANDUS B, S.H., M.H. 3) TITUS TANDI, S.H., M.H. 4) GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. 5) USAHA GINTING, S.H., M.H. 6) LAMBERTUS LIMBONG, S.H. KEPANITERAAN 1) ABD. LATIF, S.H. 2) ANDI FAJAR MENYINGSING, S.H. 3) HASMAWATI, S.H. 4) Dra. A. HARNI, S.H. 5) NUR RISMAYANTI, S.H., M.H. 6) Hj. BAJI, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI KESEKRETARIATAN : 1) MAHDALENA REHULINA GINTING, S.E. 2) AISYA RIZKI ASTARI, S.Kom. 3) DEVITA KURNIA SARI, A.Md.	WILAYAH VIII	1. PN. SIDRAP 2. PN. ENREKANG 3. PN. MAKALE

NO	NAMA	JABATAN	DAERAH	HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH
9.	1) TAHSIN, S.H., M.H. 2) H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H. 3) HARINI, S.H., M.H. 4) RENO LISTOWO, S.H., M.H. 5) MULIJANTO, S.H., M.H. 6) EKO KARYADI, S.H., M.H. 7) HASDIAWATI, S.H., M.H. KEPANITERAAN : 1) Drs. DJAMALUDDIN DN, S.H. M.Hum. 2) JABAL NUR AS, S.Sos., M.H. 3) ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H. 4) SITI SOHORAH HANNAN, S.H.	HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM TINGGI HAKIM AD HOC HAKIM AD HOC KESEKRETARIATAN : 1) MURSYID SALEH, S.E. 2) YUSI TRIANY SINAGA, S.E., M.H. 3) INGGOU DAVID PURBA, S.Kom., S.H., M.H. 4) RIO RAKHMAT ANUGRAH H., S.E.	WILAYAH IX	1. PN. PASANGKAYU 2. PN. MAMUJU

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Dr. SYAHRIL SIDIK, S.H., M.H.

B. Evaluasi

Evaluasi Pengadilan Tinggi Makassar dilakukan secara berkala terhadap semua unsur baik Hakim Tinggi, Tenaga Kepaniteraan maupun Kesekretariatan baik pejabat maupun staf juga Tenaga Honorer dilakukan setiap bulan pada saat Rapat Bulanan, selain membahas temuan hasil pengawasan bidang, juga tentang disiplin kerja, disiplin waktu, hasil kerja/kinerja baik perkara, kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hasil evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan dan dibuat dokumen notulen rapat. Untuk Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) juga dilakukan Penilaian secara tertulis terdiri dari beberapa kriteria termasuk daftar hadir masing - masing oleh pejabat yang berwenang setiap akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk dapat atau tidaknya yang bersangkutan diperpanjang sebagai tenaga PPNPN pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Se-Sulawesi Selatan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan telah terakreditasi;
2. Seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Rekapitulasi perkara Perdata banding, sisa tahun 2021: 51 perkara, masuk tahun 2022: 482 perkara, putus tahun 2022: 453 perkara, cabut tahun 2022: 0 perkara, sisa tahun 2022: 80 perkara;
4. Rekapitulasi perkara Pidana, sisa tahun 2021: 103 perkara, masuk tahun 2022: 942 perkara, putus tahun 2022: 945 perkara, sisa tahun 2022: 100 perkara;
5. Rekapitulasi perkara Tipikor, sisa tahun 2021: 0 perkara, masuk tahun 2022: 42 perkara, putus tahun 2022: 42 perkara, sisa tahun 2022: 0 perkara;
6. Rekapitulasi perkara Pidana Anak, sisa tahun 2021: 1 perkara, masuk tahun 2022: 33 perkara; putus tahun 2022: 34 perkara, sisa tahun 2022: 0 perkara;
7. Seluruh sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan Pidana Anak tahun 2021 telah diputus di tahun 2022;
8. Untuk Posbakum seluruh Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan mendapatkan anggaran dan rata-rata realisasi mencapai 99,53%;
9. Untuk Sidang Keliling hanya ada 3 satuan kerja yang mendapat anggaran dengan rata-rata realisasi sebesar 99,65%, untuk Tahun Anggaran 2022;
10. Untuk DIPA 01 dari anggaran Badan Urusan Administrasi penyerapan pada Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal mencapai 98,74%;
11. Untuk DIPA 03 dari Anggaran Direktorat Jenderal Badilum penyerapan pada Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan mencapai 94,47%;
12. Barang Milik Negara berupa Tempat Sidang Tidak Tetap/Setting Plat yang ada di beberapa Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Makassar dalam kondisi rusak berat dan perlu anggaran untuk pemeliharaan atau renovasi guna peningkatan fungsi;
13. Rumah dinas dimasing-masing satker belum mencukupi kebutuhan terutama untuk para hakim pengadilan dan belum dilengkapi dengan inventaris/meubelair;
14. Beberapa satuan kerja belum tersedia Rumah Dinas untuk Sekretaris;
15. Untuk gedung Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan rata-rata masih belum seluruhnya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
16. Pada Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Makassar telah melaksanakan Bimbingan Teknis baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang diikuti seluruh satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Makassar;
17. Pengadilan Negeri Se- Sulawesi Selatan sudah menggunakan sistem keterbukaan informasi dengan fasilitas website dan email;

18. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di Pengadilan Negeri sudah hampir semuanya lengkap namun belum mendukung performa aplikasi e-court dan e-berpadu.
19. Setiap satker yang berada pada wilayah Pengadilan Tinggi Makassar sudah menerapkan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court baik untuk pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
20. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara rutin berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya anggaran khusus untuk menunjang jalannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada pengadilan tingkat pertama, yaitu salah satunya mengenai infrastruktur pada jaringan baik jaringan lokal maupun internet;
2. Perlu adanya pelatihan secara rutin bagi operator IT di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar mengenai perawatan dan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk membantu menunjang kerja operator IT;
3. Perlu adanya anggaran khusus untuk renovasi gedung sesuai prototype pengadilan guna terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor;
4. Perlu adanya penambahan ruang kerja hakim khususnya hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar dikarenakan ruang kerja hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar kurang memadai demikian pula dengan meubelairnya;
5. Tambahan anggaran untuk kebutuhan yang diperlukan sebagai sarana dan prasarana pelaksanaan tupoksi agar diprioritaskan guna pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif dengan harapan bisa mencapai hasil optimal;
6. Personil yang ada di setiap unit organisasi/satker hendaknya ditugaskan pada bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan guna hasil yang optimal, efektif dan efisien;
7. Dalam rangka pembinaan menuju profesionalisme pegawai perlu adanya Diklat Pegawai sesuai dengan sasarannya;
8. Perlunya penambahan daya internet seiring penggunaan aplikasi-aplikasi terkait inovasi satuan kerja dan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di wilayah Sulawesi Selatan.
9. Idealnya personil yang menangani kepegawaian di PT Makassar ini adalah personil yang trampil dalam menggunakan peralatan perkantoran yang modern, utamanya jaringan internet dan komputer, serta telah mengikuti diklat atau bimbingan teknis di bidang kepegawaian. Hal ini untuk menunjang di dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di bidang kepegawaian yang hampir tiap hari menemui kasus-kasus di bidang kepegawaian. Dengan jumlah personil yang ada pada sub bagian Kepegawaian dibutuhkan tambahan ASN guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
10. Peningkatan kelas Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan.